

# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

**BRMP**  
SULAWESI SELATAN

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

# KATA PENGANTAR



**P**uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nyalah BPMP Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang tersusun dalam Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Selatan ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai ini pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna membangun landasan kerja yang baik, menyusun struktur organisasi Balai untuk dapat menjamin efektivitas kerja dan meningkatkan kapasitas kinerja Balai. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2025 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BPMP Sulawesi Selatan di tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPMP Sulawesi Selatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Sebagai manusia biasa, dalam menyusun LAKIN ini tentunya tidak terlepas dari kekeliruan baik dari segi penulisannya, isinya maupun objektivitas

data yang digunakan sehingga masih diperlukan penyempurnaannya, kami berharap mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi karyawan untuk lebih disiplin lagi dalam bekerja dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Makassar, Januari 2026

Kepala BPPM Sulawesi Selatan



Ir. Yusuf, M.Si

NIP. 19671027 200312 1 001

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Laporan kinerja (LAKIN) Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran BPMP Sulawesi Selatan. Visi BPMP Sulawesi Selatan sejalan dengan Visi BRMP yaitu "*Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan*".

BPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2025 mengelola anggaran dengan besaran Rp. 24.988.763.884. Realisasi BPMP Sulawesi Selatan berdasarkan SPAN adalah sebesar Rp. 24.988.763.884 (99,06%) dengan sisa anggaran Rp. 236.577.116 (0,94%). Anggaran ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas kinerja Balai untuk pencapaian tujuan. Untuk itu diperlukan daya dukung yang handal dalam bentuk empat pilar utama yaitu sumber daya manusia yang bermutu, sistem teknologi yang terpadu, strategi yang tepat, serta dukungan keuangan yang memadai.

Capaian sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu 1) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan target 1 lembaga dan capaian yang diperoleh 1 lembaga yang telah didampingi (100%), 2) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan dengan target 100 unit dan capaian 100 unit benih (100%), 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian Nilai 83,14 (103,89%), dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian nilai 94,89 (104,27%).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2025 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan diseminasi dan penerapan teknologi dan standar, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPMP Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
I. PENDAHULUAN .....	10
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi .....	11
1.3 Tantangan dan Peran Strategis .....	15
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis Organisasi .....	17
2.2 Perjanjian Kinerja .....	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	27
3.3 Capaian Kinerja Lainnya .....	42
3.4 Realisasi Anggaran .....	54
IV. PENUTUP .....	63
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja.....	63
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja .....	64
LAMPIRAN .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan .....	13
Tabel 2. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 3. Sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja program.....	19
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan I) .....	21
Tabel 6. Lampiran Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan I) .....	22
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan II) .....	22
Tabel 8. Lampiran Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan II) .....	23
Tabel 9. Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen di Lingkup BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	23
Tabel 10. Capaian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....	26
Tabel 11. Capaian kinerja sasaran terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani.....	27
Tabel 12. Hasil gabah kering panen (GKP) dan GKG Lokasi IP2MP Gowa dan IP2MPLuwu.....	32
Tabel 13. Hasil Uji Mutu Benih Padi di Lokasi Perbenihan IP2MP Gowa .....	32
Tabel 14. Hasil Uji Mutu Benih Padi di Lokasi Perbenihan IP2MP Luwu .....	32
Tabel 15. Hasil produksi benih sumber padi (SS) di KP. Gowa dan KP. Luwu 2025.....	33
Tabel 16. Distribusi Benih Sumber Padi (SS) BRMP SulSel per Januari 2026	34
Tabel 17. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan .....	35
Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan .....	38
Tabel 19. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023-2025 oleh BPMP Sulawesi Selatan .....	40
Tabel 20. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Renstra BPMP Sulawesi Selatan .....	41
Tabel 21. Capaian LTT Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....	50
Tabel 22. Progres OPLAH Rawa Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....	52
Tabel 23. Progres Cetak Sawah Rakyat Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....	53
Tabel 24. Detail Revisi Anggaran 2025 BPMP Sulawesi Selatan .....	56

Tabel 25. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2025 .....	58
Tabel 26. Capaian Output Kegiatan BPMP Sulawesi Selatan Ta. 2025 .....	59
Tabel 27. Penerimaan Negara Bukan Pajak BPMP Sulawesi Selatan TA. 2025.....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Perbandingan Capaian LTT Sulawesi Selatan Tahun 2022-2025.	49
Gambar 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPMP Sulawesi Selatan .....	54
Gambar 3. Data Efisiensi SBK BPMP Sulawesi Selatan.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Selatan .....	66
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	67
Lampiran 3. Manual IKU BPMP Sulawesi Selatan .....	75
Lampiran 4. Rencana Aksi BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....	82
Lampiran 5. SOP Penyusunan LAKIN BPMP Sulawesi Selatan .....	83
Lampiran 6. SK Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan .....	89
Lampiran 7. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Selatan .....	93
Lampiran 8. Sertifikat SNI Lembaga Penerap .....	97
Lampiran 9. Sertifikat Penghargaan Kategori Informatif .....	99

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu eselon di bawah kementerian Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Selatan memiliki peranan strategis sebagai penghubung antara inovasi teknologi pertanian dan praktik usaha tani di tingkat lapangan dengan wilayah kerja di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Balai ini berfungsi menerapkan, menguji, dan mendiseminasikan teknologi pertanian modern yang spesifik lokasi sesuai dengan kondisi agroekosistem dan karakteristik komoditas unggulan daerah. Melalui kegiatan percontohan, pendampingan, bimbingan teknis, serta penguatan kapasitas petani dan penyuluh, BRMP mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan keberlanjutan sistem pertanian. Selain itu, BRMP turut berperan dalam penyediaan dan pengujian benih unggul, pengembangan model budidaya modern, serta pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program pembangunan pertanian daerah. Dengan peran tersebut, BRMP menjadi salah satu motor penggerak percepatan modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, BRMP dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi masih terbatasnya tingkat adopsi

teknologi oleh petani akibat perbedaan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan akses permodalan, serta kebiasaan bertani yang masih bersifat konvensional. Selain itu, keragaman kondisi agroekologi dan sosial ekonomi antarwilayah di Sulawesi Selatan menuntut teknologi yang benar-benar adaptif dan fleksibel. Keterbatasan sarana prasarana, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas sektor dan lintas kelembagaan juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi optimalisasi peran balai dalam mendorong modernisasi pertanian secara merata.

Di sisi lain, BPMP Sulawesi Selatan memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya ke depan. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap swasembada pangan dan modernisasi pertanian, perkembangan teknologi digital dan mekanisasi, serta meningkatnya kesadaran petani terhadap pentingnya efisiensi dan keberlanjutan usaha tani menjadi peluang strategis. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan kelompok tani membuka ruang pengembangan inovasi yang lebih luas dan aplikatif. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, BPMP Sulawesi Selatan dapat semakin mempercepat transformasi sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

BPMP Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, sehingga berdasarkan, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas lembaga pemerintah yang memuat output kinerja yang dicapai selama tahun berjalan atas pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja. Dengan adanya pelaporan ini, maka akan menjadi kontrol untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program kerja, dan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

BPMP Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya BPMP Sulawesi Selatan bertanggung jawab kepada Kepala BRMP dan Menteri Pertanian. Untuk itu, guna mendukung kinerja balai maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. BPMP Sulawesi Selatan diperkuat oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang struktur organisasinya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Struktur organisasi BPMP Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, terdiri dari Kepala Balai yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPMP Sulawesi Selatan dilengkapi dengan dua tim kerja yang berperan membantu pelaksanaan tugas kepala balai, yaitu tim kerja Program dan Evaluasi serta tim kerja layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian. Pelaksanaan penerapan modernisasi pertanian di wilayah kerja BPMP Sulawesi Selatan juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional seperti penyuluh pertanian, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, serta beberapa kelompok jabatan fungsional keterampilan. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

### 1.2.1 Sumber Daya dan Keunggulan Instansi

Rincian tenaga kerja yang ada di BPMP Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 185 orang, terdiri dari 89 orang PNS, 14 orang PPPK dan 82 orang PPPK Paruh Waktu. Jabatan fungsional tertentu diisi oleh 16 orang penyuluh pertanian, 11 orang pengawas mutu hasil pertanian, 3 orang pengawas bibit ternak, 9 orang pengawas benih tanaman, serta jabatan fungsional lainnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM BPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	2
2	Penyuluh Pertanian	16
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	11
4	Pengawas Bibit Ternak	3
5	Pengawas Benih Tanaman	9
6	Teknisi Litkayasa	2
7	Pustakawan	3
8	Analisis SDM Aparatur	2
9	Analisis Perkarantina Tumbuhan	3
10	Analisis Standardisasi	1
11	Fungsional Umum	51
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>

BPMP Sulawesi Selatan selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadaan instalasi Pengujian dan Modernisasi Pertanian (IP2MP) di beberapa lokasi, yaitu IP2MP Gowa di Kabupaten Gowa, IP2MP Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, IP2MP Bone-bone dan IP2MP Luwu di Kabupaten Luwu Utara, serta Laboratorium Pengujian di Kabupaten Maros. Masing-masing IP2MP memberikan kontribusi yang berbeda bergantung pada lokasi dan luas lahannya. Sebaran SDM untuk masing-masing IP2MP dan Laboratorium dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretariat BRMP Sul-Sel	9	47	3		59
2	IP2MP Gowa	1	5	4	2	12
3	IP2MP Jeneponto	1	2		1	4
4	IP2MP Bone-Bone			2		2
5	IP2MP Luwu		2	3		5
6	Laboratorium Pengujian Maros		3	4		7
	Jumlah	11	59	16	3	89

a. IP2MP Gowa

IP2MP Gowa terletak di Desa Pa'bentengan, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, memiliki aset lahan seluas 96,17 ha. Komoditas utama yang dikembangkan di IP2MP ini adalah ayam dan sapi bali dengan lahan aktif seluas 58,07 ha dan yang tidak aktif seluar 4,6 ha. Pemeliharaan sapi bali di IP2MP Gowa tidak hanya berfokus pada produksi ternak , tetapi juga pada aspek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat peternak di wilayah Gowa dan sekitarnya. Total populasi sapi Bali pada tahun 2025 di IP2MP Gowa sebanyak 78 ekor dengan rincian dewasa jantan 15 ekor, dewasa betina 45 ekor, dara Jantan 3 ekor, dara betina 8 ekor dan anak belum lepas saphi 7 ekor. Budidaya ayam KUB di IP2MP Gowa Selatan berfokus pada manajemen pemeliharaan intensif untuk produksi DOC pedaging, serta sebagai lokasi praktik kerja lapang dan pembelajaran bagi mahasiswa/peternak. Budidaya Ayam KUB sebanyak 846 ekor per bulan Desember 2025, selama Januari-Desember 2025 masa produksi telur sebanyak 9899 butir, ayam afkir 414 ekor dan DOC 2530 ekor.

Selain untuk pengembangan sapi bali dan ayam, lahan di IP2MP juga dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, seperti perbenihan padi, optimasi lahan padi, uji efektivitas pupuk, uji Multi lokasi pupuk, optimasi lahan jagung, serta untuk pertanaman hortikultura dan tanaman pangan lainnya.

b. IP2MP Jeneponto

IP2MP ini terletak di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara dengan luasan lahan sebesar 27,603 ha dengan lahan aktif seluas 24 ha, sisanya digunakan untuk sarana perkantoran. Adapun komoditas utama yang dikembangkan di IP2MP ini dari kelompok hortikultura, seperti mangga, sirsak, pisang, cabai, bawang merah, dan jagung.

c. IP2MP Bone-Bone

IP2MP Bone-Bone berlokasi di Dusun Kapipe, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan luasan total sebesar 36,2 ha dan komoditas utama berupa kakao dan kelapa sawit.

d. IP2MP Luwu

IP2MP Luwu terletak di Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Total luas lahan di IP2MP ini adalah 33,6 ha sawah dan 7,5 ha lahan kering dengan komoditas utama berupa padi, kelapa sawit, rambutan, dan kakao. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di IP2MP Luwu pada Tahun 2025 adalah budidaya padi yang hasilnya disetorkan sebagai PNBPN, perbenihan padi, pemeliharaan tanaman kakao sebanyak 145 pohon yang terdiri dari beberapa klon seperti klon BB, klon S2, dan klon MCC, pemeliharaan tanaman kelapa sawit dengan luasan 2 ha, serta pemeliharaan tanaman rambutan sebanyak 49 pohon.

#### e. Laboratorium Pengujian Maros

Laboratorium Pengujian BPMP Sulawesi Selatan merupakan pelaksana teknis dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. DR. Ratulangi, Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Tugas utama Laboratorium ini adalah pelayanan jasa dibidang analisis tanah, pupuk, tanaman, air, pakan ternak dari peneliti, perguruan tinggi, instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun mahasiswa secara perorangan. Disamping itu, laboratorium ini dapat melayani permintaan jasa analisis langsung petani. Laboratorium Pengujian BPMP Sulawesi Selatan juga diberi mandat untuk melakukan uji mutu pupuk organik sesuai dengan PERMENTAN No. 1 Tahun 2019 dan pupuk anorganik sesuai dengan PERMENTAN No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017.

Laboratorium BPMP Sulawesi Selatan tahun 2025 telah melakukan Layanan Pengujian dibidang Kimia Tanah, Pupuk, Tanaman, air dari berbagai pihak seperti swasta, perguruan tinggi, kantor pemerintah maupun dari petani. Sebagai Laboratorium yang mendapat mandat dari Menteri Pertanian yang ditunjuk sebagai Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas juga telah melayani pihak produsen pupuk dalam pengurusan ijin edar pupuk di Kementerian Pertanian. Disamping itu juga menerima magang/praktik dari berbagai Universitas ataupun sekolah di wilayah Sulawesi Selatan.

### **1.3 Tantangan dan Peran Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPMP Sulawesi Selatan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan eksternal meliputi dinamika perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan adopsi teknologi modern oleh sebagian pelaku usaha tani, serta beragamnya karakteristik agroekosistem dan sosial ekonomi wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, tuntutan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap ketahanan pangan nasional mengharuskan BRMP untuk menghasilkan inovasi yang adaptif, aplikatif, dan berdampak nyata.

Sementara itu, tantangan internal mencakup kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterbatasan sumber daya dan tuntutan efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi faktor yang menuntut peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BPMP Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai penggerak penerapan inovasi dan modernisasi pertanian di wilayah. BPMP berperan sebagai pusat diseminasi teknologi pertanian adaptif lokasi, penguatan kapasitas petani dan penyuluh, serta fasilitator kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. Melalui kegiatan riset terapan, pendampingan, dan demonstrasi teknologi, BPMP mendorong percepatan adopsi inovasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan daya saing komoditas unggulan daerah.

Selain itu, BPMP Sulawesi Selatan berperan penting dalam mendukung pencapaian program strategis Kementerian Pertanian, khususnya modernisasi pertanian dan swasembada pangan. Peran ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, penyediaan data dan informasi berbasis bukti, serta peningkatan kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan menjalankan peran strategis tersebut secara konsisten, BPMP Sulawesi Selatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan petani.

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Organisasi

BPMP Sulawesi Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Eselon III yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yang secara hierarkis merupakan *Business unit* dari BRMP melalui koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP). Visi, misi, tujuan, dan kegiatan BPMP Sulawesi Selatan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategis, dan program seluruh satuan kerja BRMP, termasuk Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu :

*“Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan”.*

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi BPMP Sulawesi Selatan yang merujuk pada misi BBPPMP 2025-2029 yaitu :

1. Melaksanakan perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
3. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;

Tujuan dari BPMP Sulawesi Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari BRMP di wilayah Sulawesi Selatan tentu tidak terlepas dari tujuan BBPPMP Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Terlaksananya perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional ;

2. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming* dan modern ;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani ;
5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

BPMP Sulawesi Selatan mengampu tiga program utama, yaitu (1) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (2) Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan (3) Dukungan Manajemen. Program nilai tambah dan daya saing industri diarahkan untuk mengakomodir kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta kegiatan penyediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas menjamin produksi dan pasokan pangan melalui kegiatan penerapan pertanian modern oleh petani seperti teknologi digital, *smart farming*, dan *modern farming* yang diarahkan untuk peningkatan produksi agar mampu secara ekonomi dan fisik untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan. Sementara program dukungan manajemen adalah program dengan aktivitas generik untuk mendukung kegiatan teknis. Adapun sasaran kegiatan BPMP Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Uraian sasaran dan target pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja program

No	Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>A</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>					
<b>1</b>	Sasaran : Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani  Indikator : Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	1	1	1	1	1
<b>2</b>	Sasaran : Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani  Indikator : Jumlah petani yang menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern Farming</i> (orang)	-	50	50	50	50
<b>B</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>					
<b>1</b>	Sasaran : Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif  Indikator : - Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (teknologi) - Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit)	- 100	1 200	1 250	1 280	1 300
<b>C</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
<b>1</b>	Sasaran : Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima  Indikator : Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80,02	80,05	80,10	80,15	80,20
<b>2</b>	Sasaran : Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas					

Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	91	91	91	91	91
--	----	----	----	----	----

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat kesepakatan formal antara pimpinan dan unit kerja untuk mencapai target-target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia, serta indikator yang terukur untuk menilai pencapaian sasaran tersebut. Dokumen ini menjadi bagian penting dari sistem akuntabilitas kinerja dan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan Kementerian Pertanian dan unit-unit pelaksanaannya seperti BRMP. PK biasanya disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan disesuaikan setiap tahun agar target yang ditetapkan relevan dengan tugas, fungsi, dan prioritas program yang hendak dicapai.

BPMP Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 telah menyusun perjanjian kinerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program Kementerian Pertanian (Lampiran 2) yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama BPMP Sulawesi Selatan seperti yang tercantum pada Lampiran 3. Sasaran dan indikator yang tercantum di dalam perjanjian kinerja BPMP Sulawesi Selatan telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2025. Perubahan ini dikarenakan adanya dinamika organisasi yang berpengaruh kepada kebijakan dan penganggaran yang mengakibatkan terjadi perubahan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja pertama kali ditandatangani pada 30 Desember 2024, perubahan pertama ditandatangani pada 20 Mei 2025, lalu perubahan terakhir ditandatangani pada 31 Desember 2025. Meskipun terjadi perubahan, penetapan sasaran untuk BPMP Sulawesi Selatan tidak terlepas dari tiga program utama BRMP yang tercantum di dalam Draft Renstra 2025-2029. Adapun sasaran BPMP Sulawesi Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi terakhir Tahun 2025 yaitu (1) terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani; (2) tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif; (3) terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani; (4) terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (5) terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Rincian Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada Tabel 4 sampai 8. Adapun Rencana Aksi BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	3
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilangkan (unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	85

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan I)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahtani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan (Nilai)	85

Tabel 6. Lampiran Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan I)

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
<b>Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif</b>	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	100	ton
	<b>Total</b>			

Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan II)

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja Utama		Target	Satuan
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1.	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2.	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	100	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1.	Jumlah petani yang menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	Orang
<b>Lainnya</b>					
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1.	Nilai Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	80,02	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	91	Nilai (0-100)

Tabel 8. Lampiran Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Perubahan II)

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
<b>Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif</b>	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	62,5	Ton
		Produksi Calon Benih FS	-	Ton
		Produksi Calon Benih SS	37,5	Ton
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	Ton

BPMP Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan beberapa kegiatan yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target indikator yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Balai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan DIPA BPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen di Lingkup BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Program/KRO/RO/Komponen	Volume	Jumlah Biaya
1	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (BDB)</b> <i>Lembaga Penerap Standar yang Didampingi</i> Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk	4 lembaga	280,299,000
2	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (QDB)</b> <i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment</i> Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (ICARE)	1 lembaga	6,922,613,000
3	<b>Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b> <b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup</b> <i>Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi</i> Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	100 ton	1,552,600,000
4	<b>Program Dukungan Manajemen Koordinasi (AEA)</b> <i>Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian</i> Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 kegiatan	960,000,000
5	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA)</b> <i>Layanan BMN</i>	1 layanan	10,000,000

	Pelaksanaan Pengelolaan BMN		
	<i>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i> Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 layanan	10,000,000
	<i>Layanan Umum</i> Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	1 layanan	150,000,000
	<i>Layanan Perkantoran</i> Gaji dan Tunjangan	1 layanan	7,718,202,000
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>		7,591,627,000
6	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b> <i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i> Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	30,000,000

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, BPMP Sulawesi Selatan menetapkan empat sasaran kinerja yang akan dicapai, yaitu 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, 2) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keempat sasaran ini selanjutnya diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang terdiri dari : 1) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan target 1 lembaga, 2) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan dengan target 100 unit, 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan target nilai 80,02, dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan target nilai 91.

Pencapaian target kinerja dinilai dengan membandingkan kesesuaian capaian dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini merupakan salah satu metode untuk menilai kesesuaian dengan target. Untuk dapat mengukur capaian ini maka ditetapkan indikator kinerja yang harus memenuhi syarat yaitu : 1) Spesifik dan jelas, 2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 3) harus relevan, 4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, 5) harus fleksibel dan sensitif dan 6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu : 1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan 2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang dilakukan di BPMP Sulawesi Selatan adalah melalui pelaporan berkala setiap bulan dan triwulan mengenai perkembangan dan progres kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan kepada Kepala Balai berdasarkan SOP B-020/OT.210/H.12.22/04/2025 (Lampiran 5). Adapun personil yang bertugas untuk menyusun Laporan Kinerja dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7. Selain itu, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Balai dan tim Program dan Evaluasi. Adapun capaian

kinerja BPMP Sulawesi Selatan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja utama Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja Utama	Target	Capaian	Kinerja
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	1	1	100%
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (teknologi) 2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit)	- 100	- 100	- 100%
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i> (orang)	-	-	-
<b>Lainnya</b>					
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (nilai)	80.02	83.14	103.89%
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (nilai)	91	94.89	104.27%
<b>Rata-Rata</b>					<b>102.04%</b>

Tabel 10 menunjukkan BPMP Sulawesi Selatan telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan capaian sebesar 100% sehingga dapat memperoleh predikat **berhasil**, bahkan capaian kinerja untuk indikator Nilai ZI dan IKPA diperoleh nilai lebih dari 100% yaitu 103,89% dan 104,27% secara berturut-turut. Pemberian predikat ini sesuai dengan kategori yang tercantum dalam Surat Edaran 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian dimana pencapaian >100% masuk ke dalam kategori sangat berhasil, capaian 90-100% dikategorikan ke dalam predikat berhasil, capaian 60-79%

dikategorikan cukup berhasil, dan untuk capaian 0-59% dikategorikan tidak berhasil.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 diukur berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BRMP Tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut maka disusunlah tim pengelola kinerja organisasi seperti yang tercantum pada Lampiran 7. Capaian ini diukur berdasarkan kesesuaian antara target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

#### **Sasaran 1 : Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani**

Sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja "jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan". Capaian yang diperoleh untuk indikator ini sesuai dengan target yaitu 1 lembaga seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11. Target dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Peningkatan Mutu Produk.

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1 lembaga	1 lembaga	100

#### **a. Pendampingan Penerapan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan**

Pendampingan penerapan SNI dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis dan konsultasi, pengujian produk berdasarkan syarat mutu SNI, sertifikasi produk dan surveilen. Bimbingan teknis dilakukan mulai dari proses penerimaan bahan baku, pengolahan dan penyimpanan, proses produksi sampai proses pengemasan dan pendistribusian. Pendampingan penerapan SNI kepada UMKM ini dilaksanakan dengan harapan UMKM di Indonesia mampu menerjemahkan dokumen standar menjadi kepuasan pelanggan, sehingga siap ketika menghadapi peluang perluasan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Fokus yang tidak kalah penting adalah proses produksi dengan memperhatikan *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk memastikan bahwa produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan standar kualitas dan juga dijelaskan tentang HACCP untuk ke tingkat keberterimaan selanjutnya agar lebih diterima untuk ekspor keluar

negeri karena negara-negara maju mempersyaratkan produk yang memperhatikan HACCP.

Kegiatan pendampingan penerapan standar mutu produk dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan penerapan SNI, pengujian dan pengamatan hasil produk, memfasilitasi Lembaga penerap untuk sertifikasi, dan penyusunan laporan. Kegiatan ini berisi tahapan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yang dilakukan di Lembaga penerap yaitu petani penangkar benih padi inbrida untuk menerapkan SNI 6233:2015, dan untuk menjamin konsistensi Lembaga dalam menghasilkan produk berkualitas.

Kegiatan dilaksanakan di Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan September-Desember 2025. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : a) persiapan penyusunan proposal kegiatan, b) koordinasi dengan stakeholder, c) identifikasi lembaga penerap SNI, d) sosialisasi dan pelatihan, e) pendampingan lembaga penerap, f) pengujian dan pengamatan hasil produk dengan standar mutu produk, g) fasilitasi lembaga penerap mendapatkan sertifikasi, dan h) penyusunan laporan kegiatan.

Pendampingan penerapan standar Benih Padi Inbrida SNI 6233:2015 dilakukan pada Penangkar Benih Harapan Tani dan Penangkar Benih Tani Balla Parang Kab. Gowa. Pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan teknis saat penanaman di lapangan, pendampingan pengelolaan gudang penyimpanan, pendampingan pascapanen untuk processing benih, pendampingan pendaftaran merek dagang, pendampingan penyusunan dokumen mutu, serta pendampingan kalibrasi alat. Hasil pengajuan permohonan Sertifikasi SNI Benih Padi Inbrida ke Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yaitu PT Multicert Global Indonesia adalah terbitnya sertifikat SNI 6233:2015 bagi Penangkar Benih Harapan Tani dengan nomor sertifikat UDHT/001-MGI-135/XII/25 yang berlaku 31 Desember 2025 hingga 30 Desember 2029. Terbitnya sertifikat SNI dan penggunaan logo SNI pada kemasan produk yang dapat digunakan oleh penangkar benih dengan beberapa ketentuan yang di berikan oleh LSpro.

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk itu disusunlah langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- Kelompok penangkar belum memiliki legalitas lengkap sesuai ISO 9001.2015 yang menjadi syarat untuk mendapatkan SNI 6233.2015 tentang benih padi

inbirda. Tindak lanjut yang dilakukan adalah pendampingan penguatan kelembagaan melalui fasilitasi penerbitan legalitas penangkaran.

- Administrasi produksi dan pencatatan mutu benih belum tertib dan belum sesuai format SNI. Tindak lanjut yang dilakukan adalah melaksanakan pelatihan manajemen kelompok dan administrasi perbenihan sesuai standar SNI 6233:2015.
- Pembagian peran dalam kelompok (ketua, teknis lapang, administrasi) belum berjalan optimal. Tindak lanjut untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan penyusunan dan pendampingan penerapan SOP internal kelompok penangkar.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya sertifikasi SNI dengan Nomor UDHT/001-MGI-135/XII/25 untuk UD. Harapan Tani seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 8.

#### **b. Pendampingan Lembaga Tanaman Pangan Komoditas Jagung**

Standar instrumen pertanian memiliki peran penting dalam mendukung keamanan pangan jagung dan komoditas lainnya. Standar ini dapat membantu memastikan bahwa produk pertanian aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya. Penerapan standar yang dilakukan dalam mendukung Upsus tersebut terkait peran, budidaya tanaman sampai penanganan pasca panen, sehingga produksi dapat meningkat. Badan Perakitan dan modernisasi Pertanian memiliki peranan dalam perumusan, pengujian dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yaitu pendampingan produksi dan penggunaan terstandar, *Good Agricultural Practices (GAP)* serta *Good Handling Practices (GHP)*. Penerapan sistem *Good Agriculture Practice (GAP)* dalam budidaya pertanian tentu saja bermanfaat baik bagi produksi pertanian, pelaku pertanian itu sendiri (petani), dan lingkungan. Hanya saja karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi membuat produk hasil GAP ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan produk hasil budidaya biasa, contohnya Nenas bersertifikat. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP maka semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk pertanian yang dihasilkan.

Strategi penerapan standar sesuai dengan perencanaan arah jangka panjang pencapaian Standar Instrumen Pertanian bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing yang meliputi tiga bagian penting yang saling terkait yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan

pendampingan penerapan Modernisasi pertanian. Proses pelaksanaan pendampingan penerapan yang diawali proses perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan Modernisasi. Peran pelaksana pendampingan yang ada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan kepada lembaga sasaran, yaitu UPBS dan kelompok tani. Pendampingan dilakukan baik yang bersifat teknis maupun manajerial yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait untuk memperoleh informasi, dukungan, dan masukan dalam penyusunan Tahap pelaksanaan diawali dengan sosialisasi kepada tim pengelola UPBS terkait tujuan dan mekanisme kegiatan berupa Sosialisasi SNI benih jagung komposit. Bimbingan teknis penerapan SMM (misal ISO 9001/SNI sektor benih) dan SNI 6232:2025 untuk Benih Jagung Bersari Bebas dan dilanjutkan dengan pendampingan teknis melalui demplot perbenihan jagung komposit sebagai sarana diseminasi teknologi. Rencana kerja, serta penyiapan bahan pendampingan berupa materi teknis. Dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan lembaga tanaman pangan komoditas jagung mampu meningkatkan penerapan standar secara menyeluruh sehingga produk yang dihasilkan memiliki mutu yang lebih baik, sesuai standar nasional, dan memiliki daya saing tinggi. Kerja sama antara BRMP Sereal, BSN, dan lembaga sasaran merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem produksi jagung nasional.

Berdasarkan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, maka sebagai bentuk tindak lanjut ke depannya disusunlah rencana pendampingan lanjutan yang akan berfokus pada modernisasi fasilitas pengolahan benih (*seed processing*) serta pendampingan penggunaan teknologi digital dalam manajemen produksi.

## **Sasaran 2 : Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif**

Sasaran tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif diukur dengan indikator Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan dengan target 100 unit. Indikator ini dicapai melalui kegiatan *Produksi Benih Pokok (SS) Varietas Unggul Padi* dengan target 100 ton.

a. Produksi Benih Pokok (SS) Varietas Unggul Padi

Program Luas Tambah Tanam (LTT) menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional dengan meningkatkan luas areal tanam komoditas pertanian, khususnya padi, dalam satu periode tertentu. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produksi, efisiensi penggunaan lahan, dan indeks pertanaman (jumlah rata-rata musim tanam dalam satu tahun). Program lainnya yaitu optimalisasi penanaman pada dua juta hektare lahan rawa, yang terdiri dari satu juta hektare lahan rawa mineral dan satu juta hektare lahan rawa tadah hujan dan pengembangan padi gogo seluas 1 juta ha. Target LTT nasional tahun 2025 seluas 20,009,777 ha. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.109 tahun 2025, target LTT untuk Sulsel 1.55,587 ha. Target tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan benih yang cukup dan tepat waktu. Kebutuhan benih per hektar sekitar 25 kg, sehingga dengan luasan tersebut membutuhkan benih sekitar 38.764,675 kg.

Berdasarkan hal tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan turut serta dalam kegiatan produksi benih sumber padi dengan kelas benih pokok (SS) yang hasilnya akan digunakan oleh para penangkar benih baik pihak pemerintah maupun swasta sebagai benih sumber untuk produksi benih sebar. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan benih bermutu dalam jumlah yang cukup dan tersedia tepat waktu untuk kebutuhan benih LTT reguler, PAT, Oplah baik Rawa dan Non Rawa dalam sebagai upaya percepatan peningkatan produktivitas padi untuk segera mewujudkan target swasembada pangan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memproduksi benih sumber padi kelas benih pokok (SS) sebanyak 100 ton.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan produksi benih padi ini adalah : 1) Sosialisasi dan Koordinasi dengan dinas Pertanian Kab. Gowa dan Luwu Utara. Bertujuan meminta dukungan dan keterlibatan dinas Pertanian dalam kegiatan produksi benih padi; 2) Produksi benih padi seluas ± 23 Ha di Kab. Gowa dan 16,3 Ha di Kab. Luwu Utara; 3) Sertifikasi benih melibatkan pengawasan dari UPT BSMBTPH Sulsel; 4) Processing benih; dan 5) Distribusi benih. Kegiatan dilaksanakan di IP2MP Luwu Desa Tamuku Kab. Luwu Utara seluas 16, 3 Ha dan di Kebun IP2M, Gowa Desa Pabbentengan Kabupaten Gowa seluas 23 ha. Varietas yang diproduksi benihnya adalah Inpari 32, Inpari 42, Cakrabuana agritan, Inpago 8, Inpara 2 dan Biosalin 1 Agritan. Adapun tahapan produksi benih padi yang dilaksanakan yaitu pemilihan lokasi, persiapan sumber benih, pengolahan lahan, persemaian, pindah tanam, pemeliharaan tanaman yang terdiri dari penyiangan, pemupukan, pengairan, pengendalian OPT, roguing, panen dan perontokan, dan processing calon benih. Hasil gabah atau calon benih yang dihasilkan dari kegiatan ini selanjutnya dimasukkan ke dalam karung lalu diangkut ke gudang pengolahan setelah terlebih dahulu dilakukan

perontokan. Adapun hasil gabah kering panen (GKP) dan GKG dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil gabah kering panen (GKP) dan GKG Lokasi IP2MP Gowa dan IP2MPLuwu

No	Varietas	IP2MP Gowa			IP2MPLuwu			GKG	
		Luas Tanam	GKP (ton)	Kadar air	GKG	luas Tanam	GKP (ton)		Kadar air
1	Inpari 42	6	21000	20	16800	5	18.563	20	10725
2	Inpari 32	8	27200	19	21760	8	31.899	22	23136
3	Cakrabuana	5,4	16740	19	13400	1,3	2.527	20	1758
4	Inpara 2	2,4	7440	20	5950				
5	Inpago 8	1,2	3600	22	2880				
6	Biosalin					2	5.884	22	4200
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>75,98</b>		<b>60,790</b>	<b>16.3</b>	<b>58,87</b>		<b>39,819</b>

Calon benih yang dihasilkan selanjutnya diuji untuk melihat kelayakannya yang mencakup daya berkecambah, CVL, Kadar air, benih murni, kotoran benih dan biji gulma. Hasil uji calon benih pada Lokasi produksi IP2MP Gowa dan IP2MP Luwu disajikan pada Tabel 13 dan 14.

Tabel 13. Hasil Uji Mutu Benih Padi di Lokasi Perbenihan IP2MP Gowa

No	Parameter pemeriksaan	Standar mutu BP	Inpari 32	Inpari 42	Cakra buana	Inpara 2	Inpago 8
1	Kadar air	maks 13,0	11,7	11,3	12,3	12,5	12,4
2	Benih Murni	min 98,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,8
3	Kotoran Benih	maks 2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
4	Benih Tanaman Lain	maks 0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Biji Gulma	maks 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Daya Berkecambah	min 80	88	85	99	89	90
<b>Keterangan</b>			<i>Lolos</i>	<i>Lolos</i>	<i>Lolos</i>	<i>Lolos</i>	<i>Lolos</i>

Tabel 14. Hasil Uji Mutu Benih Padi di Lokasi Perbenihan IP2MP Luwu

No	Parameter pemeriksaan	Standar mutu BP	Cakra buana	Inpari 32	Inpari 42	Biosalin
1	Kadar air	maks 13,0	12,6	13	12,6	11,7
2	Benih Murni	min 98,0	99,8	99,8	99,7	99,3
3	Kotoran Benih	maks 2,0	0,2	0,2	0,3	0,7
4	Benih Tanaman Lain	maks 0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Biji Gulma	maks 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Daya Berkecambah	min 80	83	75	46	65
<b>Keterangan</b>			<i>lolos</i>	<i>Tidak lolos</i>	<i>Tidak lolos</i>	<i>Tidak lolos</i>

Hasil uji mutu benih pada Tabel 13 menunjukkan bahwa varietas Inpari 42, Inpari 32, Inpara 2, Inpago 8 dan Cakrabuana agritan memenuhi syarat sertifikasi benih sehingga dapat disebarakan sebagai benih bermutu kelas benih pokok dengan label Ungu. Benih diharapkan dapat dikembangkan oleh para penangkar benih menghasilkan benih sebar untuk ketersediaan benih bermutu di tingkat petani mendukung program swasembada pangan. Sedangkan hasil pengujian calon benih dari lokasi IP2MP Luwu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 14 menunjukkan varietas Cakrabuana Agritan memenuhi syarat sertifikasi benih sehingga dapat disebarakan sebagai benih bermutu kelas benih pokok (SS) dengan label ungu. Target produksi benih berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebanyak 100 ton. Calon benih (GKG) yang di hasilkan sebanyak **100,609** ton. Hasil produksi benih sumber padi (SS) yang diperoleh dari lokasi IP2MP Gowa dan IP2MP Luwu disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil produksi benih sumber padi (SS) di KP. Gowa dan KP. Luwu 2025

No	Varietas	luas Tanam		GKG (Kg)		Benih		Total Benih per varietas (ton)
		IP2MP Gowa	IP2MP Luwu	IP2MP Gowa	IP2MP Luwu	IP2MP Gowa	IP2MP Luwu	
1	Inpari 42	6	5	16.800	10.725	16.800	tidak lolos	16.800
2	Inpari 32	8	8	21.760	23.136	21.760	tidak lolos	21.760
3	Cakrabuana	5,4	1,3	13.400	1.758	13.400	1758	15.158
4	Inpara 2	2,4		5.950		5.950		5.950
5	Inpago 8	1,2		2.880		2.880		2.880
6	Biosalin		2		4.200		tidak lolos	-
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>16,3</b>	<b>60.790</b>	<b>39.819</b>	<b>60.790</b>	<b>1.758</b>	<b>62.548</b>

Benih tersebut selanjutnya didistribusi ke penangkar benih dengan prosedur penjualan benih (PNBP) dan diseminasi benih. Penyebaran informasi terkait ketersediaan benih padi baik varietas dan jumlah stok benih per varietas disampaikan di Sistem Informasi Perbenihan yang dapat diakses di Website BRMP Sulsel. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui WA group yang disampaikan oleh LO dari setiap kabupaten ke Dinas Pertanian/stakeholder.

Hingga Januari jumlah benih yang terdistribusi melalui penjualan (PNBP) sebanyak 3.720 Kg. Harga benih per kg yaitu 12.500 sehingga total penerimaan PNBP sejumlah Rp. 46.500.000. Penjualan akan terus dilakukan MT 1 (2025-2026) hingga musim tanam (MT) II 2026. Sedangkan untuk diseminasi benih hingga Desember 2025 sebanyak 18.625 kg ke Dinas Pertanian Kab. Bulukumba, Luwu, Soppeng dan Jeneponto. Diseminasi juga akan terus dilakukan untuk mendorong penyediaan benih pertanaman MT II mendukung terwujudnya swasembada pangan. Adapun data distribusi benih padi yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Distribusi Benih Sumber Padi (SS) BRMP Sulsel per Januari 2026

NO	Varietas	Distribusi		
		Jumlah (kg)	Keterangan	Mitra
1	Inpari 42 (16.800) kg	40	PNBP	PB.Gapoktan Baraka/Sinjai
		2000	PNBP	PB. Harapan Tani/ Gowa
		80	PNBP	Polbantang Gowa
		25	PNBP	KLP Tani Maccirinnae, Bone
		625	diseminasi	Dinas TPH Bulukumba
		100	PNBP	PB Subur Prima Tani
		3400	Diseminasi	Dinas TPH Jeneponto
		1000	Diseminasi	Dinas TPH Luwu
	Total (kg)	7.270		
	<b>Sisa stok (kg)</b>	<b>9.530</b>		
2	Inpari 32 (21.760) kg	500	PNBP	PB. Harapan Tani/ Gowa
		50	PNBP	KLP Tani Maccirinnae, Bone
		1000	Diseminasi	Dinas TPH Luwu
		4300	Diseminasi	Dinas TPH Soppeng
	Total (kg)	5.850		
	<b>Sisa stok (kg)</b>	<b>15.910</b>		
3	Cakrabuana (15.158) kg	500	PNBP	PB. Harapan Tani/ Gowa
		200	PNBP	Polbantang Gowa
		2000	Diseminasi	Dinas TPH Luwu
		4550	Diseminasi	Dinas TPH Soppeng
	1750	Diseminasi	Dinas TPH Jeneponto	
Total (kg)	9.000			
	<b>Sisa stok (kg)</b>	<b>6.158</b>		
4	Inpago 8 (2.880) kg	35	PNBP	CV.Dapisindo. Gowa
		10	PNBP	BRMP Kaltim
		180	PNBP	Polbantang Gowa
	Total (kg)	225		
	<b>Sisa stok (kg)</b>	<b>2655</b>		
5	Inpara 2 (5.950) kg			
		Total (kg)	0	
		<b>Sisa stok (kg)</b>	<b>5.950</b>	
	<b>Total diseminasi (kg)</b>	<b>4345</b>		
	<b>Total Stok benih(kg)</b>	<b>58.203</b>		

**Sasaran 3 : Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dicapai berdasarkan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian seperti yang terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
<b>Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan</b>	80,02	83,14	103.89

Zona Integritas dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pembangunan Zona Integritas juga diarahkan untuk menumbuhkan budaya kerja aparatur yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terus meningkat.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui penerapan berbagai metode yang terintegrasi dan berkelanjutan, meliputi penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, pelaksanaan manajemen perubahan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas, penataan sistem dan prosedur kerja agar lebih efektif, efisien, dan transparan, serta penerapan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berbasis kinerja. Selain itu, dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan, disertai peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme umpan balik dari masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Penerapan Zona Integritas ini telah diatur dalam Permenpan RB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian Zona Integritas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dalam membangun sistem pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Penilaian dilaksanakan melalui mekanisme penilaian internal oleh Kementerian Pertanian dan penilaian eksternal oleh Kementerian PANRB, dengan berpedoman pada ketentuan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penilaian difokuskan pada dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit menilai upaya dan proses yang dilakukan unit kerja melalui penerapan enam area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen, implementasi kebijakan, inovasi yang dikembangkan, serta konsistensi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan unit kerja.

Sementara itu, komponen hasil menilai dampak nyata dari pembangunan Zona Integritas, yang diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan persepsi pemangku kepentingan. Penilaian hasil dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti-korupsi, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, serta capaian kinerja pelayanan. Hasil penilaian ini menjadi dasar penetapan predikat WBK atau WBBM, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

BPMP Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 telah melalui penilaian Zona Integritas dan diperoleh nilai yang memuaskan dan melebihi dari target yang ditetapkan. Target nilai ZI untuk tahun 2025 adalah sebesar **80,02** dan hasil penilaian yang diperoleh adalah **83,14 (103,89%)**. Pencapaian ini menandakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BRMP berjalan secara efektif dan konsisten, khususnya dalam penerapan enam area perubahan Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan melampaui target Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, penguatan budaya kerja berintegritas, serta optimalisasi sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat turut berkontribusi terhadap perolehan nilai Zona Integritas yang lebih tinggi dari target. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program Zona Integritas, tetapi juga menjadi dasar penguatan kinerja organisasi dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPMP Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

#### **Sasaran 4 : Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa penggunaan anggaran negara memberikan hasil yang optimal, efektif, efisien, dan akuntabel. Ketentuan utama pengukuran kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Selain itu, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran juga diperkuat melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menekankan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga capaian kinerja BRMP tidak hanya dinilai dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil dan manfaat yang dihasilkan.

Lebih lanjut, secara konseptual pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus berbasis kinerja. Dengan demikian, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan BRMP dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: (1) Capaian Rincian Output (CRO), (2) Penyerapan anggaran,

(3) Efisiensi, dan (4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai kinerja anggaran BPMP Sulawesi Selatan sebesar 94,89 (104,27%) yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (nilai)	91	94,89	104,27

Capaian nilai indikator kinerja anggaran di lingkungan BPMP Sulawesi Selatan pada tahun pelaporan menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari nilai kinerja anggaran yang melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BRMP telah berjalan secara efektif dan efisien, dengan tingkat keselarasan yang tinggi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan, serta berorientasi pada pencapaian output dan outcome yang terukur.

Keberhasilan melampaui target nilai kinerja anggaran tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang semakin berkualitas, pengendalian pelaksanaan anggaran yang konsisten, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, peningkatan koordinasi antar unit kerja, kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja anggaran. Capaian ini menjadi bukti komitmen BRMP dalam menerapkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Perbandingan capaian kinerja BRMP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun awal periode penilaian, capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek efektivitas pelaksanaan program dan penguatan akuntabilitas. Pada tahun berikutnya, kinerja BPMP Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan membaiknya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran, serta meningkatnya kualitas output dan layanan kepada pemangku

kepentingan. Selanjutnya, pada tahun pelaporan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih optimal dengan realisasi kinerja yang melampaui target, mencerminkan semakin matangnya penerapan manajemen kinerja, penguatan pengendalian internal, serta konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BRMP Sulawesi Selatan.

Peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari perbaikan berkelanjutan dalam kualitas perencanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan pada tahun berjalan turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan. Tren positif ini menunjukkan komitmen BPMP Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program guna mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023-2025 oleh BPMP Sulawesi Selatan tersaji pada Tabel 19. Sedangkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target renstra dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 19. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023-2025 oleh BPMP Sulawesi Selatan

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	1	1	-	-
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	1	1	-	-
2	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	-	-	-	-	1	1
3	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	14,001	14,001	21	15.5	-	-
4	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (teknologi)	-	-	-	-	-	-
		2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit)	-	-	-	-	100	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	76	76	80	80.02	-	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (nilai)	-	-	-	-	80.02	83.14
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	91	91.97	92,44	97.45	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (nilai)	-	-	-	-	91	94.89

Tabel 20. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Renstra BPMP Sulawesi Selatan

Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025	Target Renstra					Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029			
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	1	1	1	1	1	1	1	100%
Jumlah petani yang menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern Farming</i> (orang)	-	-	50	50	50	50	-	-
Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (teknologi)	-	-	1	1	1	1	-	-
Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit)	100	100	200	250	280	300	100	100%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80.02	80.02	80.05	80.1	80.15	80.2	83.14	103.89%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	91	91	91	91	91	91	94.89	104.27%
Rata-rata persentase capaian kinerja Tahun 2025								102,04

### 3.3 Capaian Kinerja Lainnya

BPMP Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 selain melaksanakan kegiatan berdasarkan sasaran pada perjanjian kinerja, juga melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung program strategis Kementerian Pertanian, diantaranya adalah Kegiatan *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) dan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Swasembada Pangan).

#### a. ***Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)***

Program ICARE mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, pada Peraturan Menteri Pertanian No.18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi. Dimana kegiatan pembangunan dilakukan mulai dari aspek hulu hingga hilir yang dikelola dalam satu manajemen kawasan berbasis korporasi dan inovasi pertanian dengan melibatkan masyarakat petani, industri/swasta, pemerintah, dan akademisi.

Program ini merupakan pengembangan pertanian terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan petani dan peternak melalui penguatan korporasi dan penguatan kelembagaan ekonomi petani. Program ICARE di Sulawesi Selatan fokus pada pengembangan komoditas sapi potong dan kentang serta peningkatan swasembada pangan padi melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani padi sebagai komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Lokasi ICARE untuk komoditas kentang dan sapi potong bertempat di 3 (tiga) desa yaitu Desa Tonasa, Desa Kanreapia dan Desa Bolaromang di kecamatan Tombolo Pao dan kelurahan Pattapang di Kelurahan Tinggi Moncong Kab. Gowa. Untuk mendukung program swasembada pangan, Kementerian Pertanian melalui program ICARE dilaksanakan di 4 (empat) yaitu Kab. Gowa, Barru, Soppeng dan Enrekang yang merupakan lokasi penerima bantuan alsintan dari ICARE melalui Brigade Pangan.

Kegiatan ICARE terdiri dari tiga komponen yaitu Komponen A: Penguatan rantai nilai di kawasan pertanian terpilih, Komponen B adalah Penguatan kapasitas institusi untuk pengembangan rantai nilai, dan Komponen C adalah Manajemen Program. Pada Tahun 2025, ICARE Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan reguler yang terdiri dari :

- Komponen A : Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian, terdiri atas beberapa sub komponen, yaitu :
  - A1.d Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta

- A2.a Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan Korporasi Petani
- A2.b Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan dan organisasi petani dalam kelompok dan Korporasi Petani
- A2.c Pengembangan rencana bisnis Korporasi Petani yang layak
  1. Penyusunan rencana bisnis korporasi petani (*Business plan*)
- Komponen B : Penguatan Kapasitas Institusi Untuk Pengelolaan Rantai Nilai, terdiri dari sub komponen :
  - B1.c Mendukung transfer dan adopsi teknologi yang sudah ada dan relevan dengan pasar
    1. Percontohan produksi benih kentang kelas G2
    2. Demonstrasi plot sapi potong
  - B2.b Penguatan kapasitas personel sektor publik
- Komponen C : Manajemen Program

Pada tahun 2025 ICARE Sulsel melaksanakan kegiatan pada komponen A terdiri dari:

- C1 Manajemen Program
- C2 Monitoring dan Evaluasi
- C3 Manajemen Pengetahuan untuk Peningkatan dan Pengarusutamaan

Hasil-hasil yang diperoleh dari setiap komponen dan sub komponen pada pelaksanaan program ini diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Komponen A

##### A1.d. Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta

- Pelaksanaan Program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*) dalam mendukung swasembada pangan telah dilaksanakan kegiatan penetapan CPCL bantuan alsintan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses identifikasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan PIU BPMP Sulawesi Selatan dan Dinas Pertanian di 4 kabupaten yaitu Gowa, Barru, Enrekang dan Soppeng.
- Point Penting selama melakukan verifikasi di 4 kabupaten yang tertuang dalam hasil *review exit meeting* telah ditindak lanjuti seperti: Fasilitasi Pembentukan Brigade pangan, Identifikasi kondisi eksisting, Penyusunan jadwal tanam, Penyusunan SOP Alsintan dan penyusunan

data base penerima manfaat dalam mendukung pencapaian Project Development Object (PDO) program ICARE.  
program ICARE

A2.a. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan korporasi petani

- Pengetahuan anggota koperasi dan petani meningkat dalam memanfaatkan teknologi secara efektif melalui kegiatan bimbingan teknis dan praktik lapang
- Korporasi petani menjadi Lembaga yang kuat dalam mengelola usaha tani secara lebih profesional melalui kegiatan Matching Grant
- Pengetahuan Site Manager dan Fasilitator meningkat sehingga dapat menjadi tenaga pendamping koperasi yang kompeten

A2.b. Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan korporasi petani

- Kegiatan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan keterampilan teknis, usaha, dan keuangan petani dan pengusaha tani muda secara berkelompok dan korporasi petani sudah dilakukan sebanyak tiga kali tema pelaksanaan diantaranya;
- Penguatan kelembagaan ekonomi petani di kawasan optimalisasi
- Produksi benih kentang terstandar mendukung ketersediaan benih kentang di kawasan ICARE
- Pengelolaan pakan ternak alternatif
- Berdasarkan hasil analisis before after kegiatan
- Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Di kawasan Optimalisasi nilai rata-rata pengetahuan before sebanyak 50,94 dan after sebanyak 84,37 sehingga peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebanyak 33,43.
- Produksi benih Kentang Terstandar mendukung ketersediaan benih kentang kawasan ICARE nilai rata-rata pengetahuan before sebanyak 70,89 dan after sebanyak 92,27 sehingga peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebanyak 21,38.
- Pengelolaan Pakan Ternak Alternatif nilai rata-rata pengetahuan before sebanyak 68,94 dan after sebanyak 97,02 sehingga peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebanyak 28,08
- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dalam rangka Meningkatkan Keterampilan Teknis, Usaha, Dan Keuangan Petani Dan Pengusaha Tani Muda Secara Berkelompok Dan Korporasi Petani sangat

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan petani dan peternak

#### A2.c1. Pendampingan penyusunan rencana bisnis korporasi petani (bisnis plan)

- Kesimpulan dari kegiatan Penyusunan Bisnis Plan adalah tersusunnya Bisnis Plan 3 koperasi yaitu Penggemukan Sapi dan pengolahan limbah ternak oleh Koperasi Tonasa Sukses Mandiri dan Penggemukan sapi serta pengolahan pakan oleh Koperasi Bolaromang Sejahtera Bersama, serta Bisnis Plan Perbenihan kentang G3 oleh Koperasi bawakaraeng Maju Bersama. Masing-masing koperasi akan mengelola usahataniya dengan membentuk Toko tani.

#### A2.c2. Penguatan rencana usaha/bisnis brigade pangan dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan

- Pelaksanaan Program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment) dalam mendukung swasembada pangan telah dilaksanakan kegiatan penetapan CPCL bantuan alsintan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses identifikasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan PIU BPMP Sulawesi Selatan dan Dinas Pertanian di 4 kabupaten yaitu Gowa, Barru, Enrekang dan Soppeng.
- Point Penting selama melakukan verifikasi di 4 kabupaten yang tertuang dalam hasil *review exit meeting* telah ditindak lanjuti seperti: Fasilitas Pembentukan Brigade pangan, Identifikasi kondisi eksisting, Penyusunan jadwal tanam, Penyusunan SOP Alsintan dan penyusunan data base penerima manfaat dalam mendukung pencapaian Project Development Object (PDO) program ICARE

## 2) Komponen B

#### B1.c.1. Percontohan produksi benih Kentang Kelas G2

- Model produksi benih kentang bermutu yang memenuhi standar sertifikasi telah berhasil diterapkan di lokasi kegiatan dan menunjukkan potensi untuk direplikasi di tingkat petani penangkar dan model produksi yang diterapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan perbenihan kentang.
- Kegiatan ini telah menghasilkan dan menyediakan benih kentang bermutu kelas G2 dengan penampilan pertumbuhan tanaman yang optimal dengan produksi calon umbi benih di blok BRMP A sebanyak 1.623 Kg/0.2 ha atau 8.1 ton/ha.

### B1.c2. Demplot penggemukan ternak sapi potong

- Perlu meningkatkan eskalasi luas layanan demplot sapi potong untuk meningkatkan kapasitas petani dalam pemeliharaan sapi sekaligus meningkatkan performa sapi koperasi yang dipelihara oleh anggotanya.
- Penanaman rumput dan legum di lahan lahan kurang produktif atau digaris kontur lahan sebagai sumber pakan yang mempunyai nilai nutrisi tinggi.
- Pemanfaatan limbah pertanian dengan teknologi pengawetan hijauan pakan menggunakan probiotik

## 3) Komponen C

### C1 Manajemen Program

- Pada kegiatan manajemen program telah melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, dengan tingkat keberhasilan program sebesar 85%
- Agar program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, maka kegiatan ICARE wajib mendapatkan kesiapan anggaran yang dimulai dari awal tahun, sehingga kegiatan dapat diselaraskan antara ketersediaan anggaran, jadwal pelaksanaannya dan kebutuhan SDM nya.

### C2 Monitoring & Evaluasi

- Pelaksanaan Program ICARE Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan.
- Sebagian besar kegiatan utama, seperti penguatan kerjasama, peningkatan kapasitas SDM (petani/BPSMF/ASN), penguatan rencana bisnis, demplot kentang dan sapi, pendampingan korporasi petani dan Brigade Pangan, ESF dan manajemen pengetahuan untuk peningkatan dan pengarusutamaan telah terlaksana dengan capaian yang cukup baik.
- Adopsi teknologi dan praktik pertanian modern mulai terlihat, namun masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.
- Ditemukan sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan waktu dan anggaran, keterbatasan modal dan keterampilan anggota korporasi dalam mengelola usaha tani, koordinasi lintas pemangku kepentingan yang belum optimal, variasi kapasitas SDM, serta kendala tata kelola dan pendanaan.

- Kegiatan ICARE tahun 2025 sudah mengacu pada target PDO tahunan sesuai AWP yang telah disepakati. Berdasarkan hasil moneyev sebagian capaian PDO sudah sesuai target tahunan, namun ada beberapa butir dalam komponen yang masih belum tercapai. Dan diharapkan di akhir program seluruh target PDO dapat tercapai.
- Beberapa rekomendasi strategis perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas dan dampak Program ICARE ke depan diantaranya yaitu penguatan perencanaan dan mitigasi risiko anggaran, peningkatan kualitas dan kesinambungan pendampingan, peningkatan kapasitas penerima manfaat dan pendamping lapang, penguatan kelembagaan ekonomi petani (koperasi/BP), penguatan materi pelatihan berbasis praktik lapangan (*hands-on learning*), serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital guna mendukung pencapaian PDO yang lebih efektif dan akurat.

### C3 Manajemen Pengetahuan Untuk Peningkatan & Pengarusutamaan

- Kegiatan Manajemen Pengetahuan untuk Peningkatan dan Pengarusutamaan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu koordinasi, identifikasi, pengumpulan dan penyusunan materi best practice, serta penyebarluasan materi. Materi yang disusun ini diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara dengan pelaku *best practice* serta melalui observasi langsung pelaksanaan *best practice*. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan pengumpulan dan perekaman materi-materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop.

#### **b. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian**

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan langkah strategis guna mempercepat pencapaian swasembada pangan. Di tahun 2025, Kementan terus memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan (olahan), hingga dukungan sarana-prasarana produksi. Program prioritas Presiden Prabowo ada empat yaitu swasembada pangan, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, serta mendorong kesejahteraan petani di seluruh Indonesia

Langkah strategis yang perlu dilakukan yakni dengan melakukan: (1) Koordinasi dengan stakeholder terkait; (2) melaksanakan kegiatan pendampingan optimalisasi lahan, pertambahan areal tanam, padi gogo dan BP untuk peningkatan produksi padi dan luas tanam; (3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan optimalisasi lahan, pertambahan areal tanam, padi gogo dan BP; (4) melakukan pelaporan data melalui aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sehingga Menteri Pertanian dapat memantau perkembangan kegiatan dari seluruh wilayah di

Indonesia. Adapun pelaksana kegiatan beserta targetnya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025.

Untuk BPMP Sulawesi Selatan sendiri terdapat sembilan Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi tanggung jawab yaitu Kabupaten Bulukumba, Maros, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare. Beberapa upaya dilaksanakan dalam rangka pengawalan dan pendampingan pencapaian target luas tambah tanam seperti koordinasi dengan pihak dinas kabupaten, penyuluh, petani, serta pengawalan dan monitoring langsung ke lokasi pertanaman. Semua upaya ini dilaksanakan untuk mencapai target bulanan yang ditetapkan berdasarkan *breakdown* target nasional.

- Capaian LTT Reguler

Pelaksanaan LTT Reguler dilakukan dengan pendampingan intensif mulai dari persiapan lahan sampai pelaporan harian kegiatan tanam dan panen sehingga pencapaian target dapat termonitor dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas produksi padi di provinsi ini. Adapun capaian LTT yang diperoleh dari Januari hingga Desember Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 20.

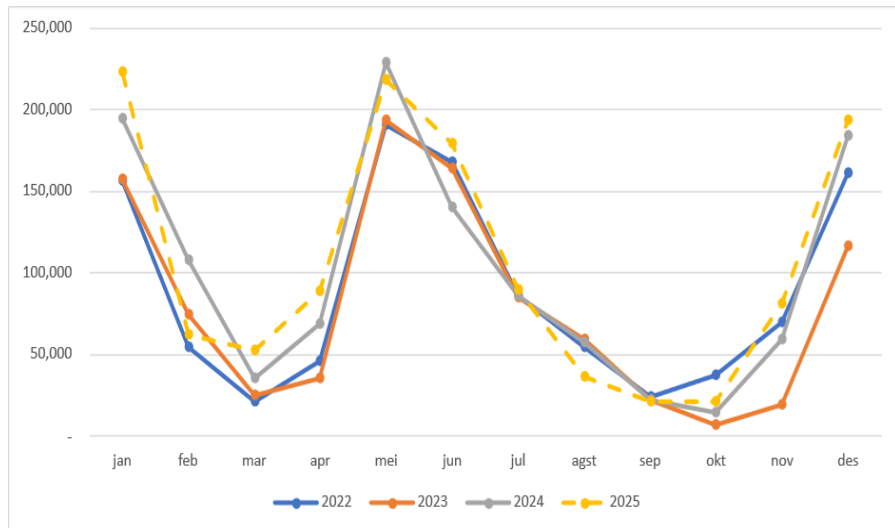
Dari tabel 20 terlihat capaian LTT Reguler untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 1,252,870 ha atau 80,80% dari total target 1,550,587 ha. Pencapaian ini disertai beberapa kendala dalam prosesnya sehingga dilakukan berbagai upaya, baik melalui rapat koordinasi teknis dan gerakan percepatan tanam oleh dinas pertanian provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk kolaborasi dengan penyuluh pertanian, TNI, dan pemangku kepentingan lain sebagai bagian dari strategi akselerasi realisasi target LTT.

Capaian Luas Tambah Tanam (LTT) di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren perubahan dinamis selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022, data statistik BPS mencatat padi sebagai komoditas utama dengan produksi tinggi dan luas panen mencapai lebih dari 1,04 juta hektare, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan LTT pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, luas panen padi di Sulawesi Selatan mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 0,97 juta hektare atau berkurang sekitar 6,8 % dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan tantangan dalam realisasi LTT akibat kondisi agroklimat atau kendala teknis di lapangan (BPS, 2024).

Memasuki tahun 2024, pola luas tanam/panen kembali menunjukkan stabilisasi dan potensi meningkat dibanding 2023, dengan estimasi luas panen sekitar 0,95 juta hektare, meskipun masih cenderung di bawah capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan upaya penguatan LTT melalui pendampingan intensif kepada petani, optimasi lahan, dan penyediaan sarana produksi. Sedangkan pada Tahun 2025m data sementara BPS memperkirakan luas panen padi meningkat menjadi sekitar 1.04 juta hektare, dengan produksi padi

sekitar 5,40 juta ton GKG, yang merupakan level tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Peningkatan ini menjadi indikasi positif bahwa realisasi Luas Tambah Tanam pada Tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan kembali mendekati capaian optimal seperti pada 2022 (BPS < 2025). Capaian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Memasuki tahun 2024, pola luas tanam/panen kembali menunjukkan stabilisasi dan potensi meningkat dibanding 2023, dengan estimasi luas panen sekitar 0,95 juta hektare, meskipun masih cenderung di bawah capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan upaya penguatan LTT melalui pendampingan intensif kepada petani, optimalisasi lahan, dan penyediaan sarana produksi. Sedangkan pada tahun 2025, data sementara BPS memperkirakan luas panen padi meningkat menjadi sekitar 1,04 juta hektare, dengan produksi padi sekitar 5,40 juta ton GKG, yang merupakan level tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Peningkatan ini menjadi indikasi positif bahwa realisasi Luas Tambah Tanam pada tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan kembali dan



Gambar 1. Perbandingan Capaian LTT Sulawesi Selatan Tahun 2022-2025

Tabel 21. Capaian LTT Sulawesi Selatan Tahun 2025

## Form Realisasi Tanam Padi Bulan Jan - Des 2025

Tabel Link

No	Kabupaten	Target Jan-Des'25	Realisasi Tanam Padi (Ha)												Jumlah Realisasi Tanam Jan-September-25	PERSENTASE	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des			
<b>INDONESIA</b>			<b>1,550,587</b>	<b>222,186</b>	<b>59,050</b>	<b>52,847</b>	<b>88,280</b>	<b>211,981</b>	<b>177,194</b>	<b>87,134</b>	<b>32,599</b>	<b>20,455</b>	<b>21,631</b>	<b>83,206</b>	<b>196,307</b>	<b>1,252,870</b>	<b>80.80</b>
1	Kepulauan Selayar	2,162	1,657	17	2	6	206	159	55	2.75	-	-	16	408	2,529	116.98	
2	Bulukumba	61,255	14,602	1,210	2,302	3,660	5,532	8,810	2,755	115.00	627	204	22	6,021	45,860	74.87	
3	Bantaeng	15,728	1,914	3,183	750	848	795	2,624	1,285	6.57	69	71	163	271	11,980	76.17	
4	Jeneponto	46,191	22,025	505	1,957	5,357	8,447	6,350	1,585	1,635.00	603	1,883	4,530	8,143	63,020	136.43	
5	Takalar	40,580	6,357	4	1,407	3,098	8,151	1,806	1,505	2,420.00	2,518	8	1,833	13,350	42,457	104.62	
6	Gowa	92,817	9,587	2,533	1,378	5,970	12,806	5,857	3,509	7,735.72	2,752	297	1,074	18,302	71,801	77.36	
7	Sinjai	32,119	10,274	1,304	283	2,670	10,043	2,263	1,656	75.00	46	72	319	5,910	34,915	108.70	
8	Maros	61,006	11,668	1,313	2,185	4,153	9,705	3,803	1,293	2,926.00	859	168	5,000	10,024	53,097	87.04	
9	Pangkajene Dan Kep.	37,037	9,207	-	104	2,821	6,233	3,650	66	354.80	32	-	405	12,747	35,620	96.17	
10	Barru	31,086	8,892	1,321	144	2,479	4,825	849	1,443	580.50	401	15	1,625	5,756	28,330	91.13	
11	Bone	247,670	25,825	2,097	17,521	17,100	42,449	38,968	12,997	117.00	1,012	3,019	13,861	28,552	203,518	82.17	
12	Soppeng	69,625	9,831	2,794	833	4,264	9,649	9,379	1,741	514.00	137	590	5,394	11,676	56,802	81.58	
13	Wajo	193,497	11,105	3,219	8,264	14,284	40,308	26,426	8,715	2,825.50	1,134	8,578	22,882	12,832	160,573	82.98	
14	Sidenreng Rappang	150,858	5,898	-	-	5,200	27,776	11,691	1,748	59.00	242	1,198	16,573	16,638	87,023	57.69	
15	Pinrang	156,505	22,343	6,911	1,278	3,965	12,011	22,944	3,501	1,250.00	729	351	1,015	22,558	98,856	63.16	
16	Enrekang	21,416	875	500	757	1,062	2,266	2,408	524	654.30	266	192	824	850	11,178	52.19	
17	Luwu	94,260	25,259	6,052	1,935	2,036	152	14,393	16,515	2,867.23	1,527	341	188	10,428	81,693	86.67	
18	Tana Toraja	30,248	446	1,670	2,376	2,658	3,311	1,534	1,351	896.30	865	788	873	722	17,489	57.82	
19	Luwu Utara	58,190	15,400	4,234	1,708	1,726	2,223	10,046	5,519	1,125.31	582	1,533	4,627	8,992	57,715	99.18	
20	Luwu Timur	62,052	4,515	15,213	3,618	1,350	220	997	16,607	4,809.89	2,024	181	70	291	49,896	80.41	
21	Toraja Utara	38,859	2,527	4,342	3,894	3,312	4,162	1,987	1,123	1,408.00	3,812	2,132	1,800	1,065	31,564	81.23	
22	Kota Makassar	3,252	565	116	133	151	555	93	48	154.47	218	10	17	323	2,384	73.30	
23	Kota Parepare	1,115	301	-	-	110	155	14	3	-	-	-	94	405	1,082	97.04	
24	Kota Palopo	3,058	1,113	512	18	-	-	142	1,592	67.05	0	-	44	3,490	114.13		

Keterangan :

- Laporan Tanam dibuat per Provinsi dengan rincian data per Kabupaten/Kota dan merupakan tanam padi regular (diluar pertanaman Oplah, cetak sawah);
- Laporan dibuat harian dan dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setelah semua data Kabupaten/Kota lengkap dan angka disepakati oleh Dandim, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- Laporan yang sudah diisi lengkap disampaikan melalui *WhatsApp Group* maksimal pukul 16:00 WIB;
- Berdasarkan target tahunan dan bulanan Luas Tanam regular, akan dilakukan penilaian kinerja capaian tanam masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota (merah, kuning atau hijau).

Pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT) tahun 2025 di Sulawesi Selatan masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari faktor alam, teknis, maupun kelembagaan. Perubahan iklim yang tidak menentu, khususnya pergeseran pola hujan dan periode kekeringan, berdampak pada ketersediaan air irigasi, terutama di lahan tadah hujan dan wilayah dengan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau sedimentasi. Di tingkat usaha tani, serangan organisme pengganggu tanaman serta risiko banjir dan kekeringan lokal turut menurunkan minat tanam dan menambah potensi gagal tumbuh. Hambatan lain muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat dan mesin pertanian, ketersediaan benih unggul, pupuk, dan pestisida yang belum merata. Kondisi sosial ekonomi petani—termasuk keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta alih fungsi dan fragmentasi lahan—juga mempengaruhi kecepatan realisasi tanam. Dari sisi kelembagaan, koordinasi lintas instansi dan penjadwalan tanam belum sepenuhnya sinkron, sementara jumlah dan jangkauan penyuluh belum sebanding dengan luas wilayah damingannya. Selain itu, kendala dalam akurasi dan ketepatan waktu pelaporan data LTT di aplikasi menyebabkan selisih antara kondisi riil di lapangan dan angka administrasi. Keseluruhan hambatan tersebut perlu ditangani melalui penguatan koordinasi, perbaikan infrastruktur irigasi, dukungan sarana produksi, serta pendampingan intensif agar target LTT 2025 di Sulawesi Selatan dapat tercapai sesuai rencana.

#### - Capaian Optimasi Lahan (OPLAH)

Progres pelaksanaan Optimasi Lahan (OPLAH) di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang signifikan baik dari sisi perencanaan hingga realisasi fisik di lapangan. Pemerintah provinsi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menargetkan OPLAH Rawa untuk Tahun 2025 seluas 18.222 Ha yang tersebar di sejumlah kabupaten seperti Bone, Luwu, Pinrang, Enrekang, Soppeng, dan Wajo. Pada akhir Desember, realisasi fisik mencapai 18.201,70 Ha. Sedangkan untuk lahan non rawa, realisasi hingga akhir Desember berjumlah total 16.982,67 Ha atau 35,36% dari total target sebesar 48.022 Ha tersebar di beberapa Kabupaten yaitu, Bantaeng, Barru, Bone, Gowa, Luwu, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, dan Wajo.

Upaya teknis pendukung lainnya juga telah dilakukan, seperti penandatanganan kontrak jasa konsultasi manajemen konstruksi oleh BBWS Pompengan Jeneberang untuk membantu percepatan OPLAH di wilayah irigasi dan rawa. Melalui kolaborasi ini dan dukungan program infrastruktur, optimasi lahan di Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman dan luas tanam sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target swasembada pangan tahun 2025. Kendala pelaksanaan OPLAH di Sulawesi Selatan terutama terkait ketersediaan air pada lahan tadah hujan, kerusakan jaringan irigasi, serta kondisi tanah yang kurang subur sehingga membutuhkan biaya rehabilitasi besar. Di lapangan, masih ada

keterbatasan alsintan, benih, dan pupuk tepat waktu, serta proses penetapan dan validasi lokasi yang cukup lama. Resistensi sebagian petani terhadap teknologi baru, cuaca ekstrem, dan serangan OPT juga memperlambat realisasi program. Progres pelaksanaan OPLAH Rawa Tahun 2025 di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 22. Progres OPLAH Rawa Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	KABUPATEN	ANGGARAN			FISIK		
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	TARGET (Ha)	REALISASI (Ha)	REALISASI (%)
1	Bone	10,253,400,000	10,253,400,000	100%	2,229.00	2,229.00	100.00%
2	Luwu	7,856,800,000	7,856,800,000	100%	1,708.00	1,708.00	100.00%
3	Pinrang	34,426,400,000	34,426,400,000	100%	7,484.00	7,484.00	100.00%
4	Enrekang	8,818,200,000	8,818,200,000	100%	1,917.00	1,916.70	99.98%
5	Soppeng	11,840,400,000	11,840,400,000	100%	2,574.00	2,574.00	100.00%
6	Wajo	10,626,000,000	7,438,200,000	70%	2,310.00	2,290.00	99.13%
	<b>Jumlah</b>	<b>83,821,200,000</b>	<b>80,633,400,000</b>	<b>96%</b>	<b>18,222.00</b>	<b>18,201.70</b>	<b>99.89%</b>

- Progres Cetak Sawah Rakyat

Progres pelaksanaan cetak sawah rakyat sampai saat ini masih berproses untuk setiap Kabupaten dengan uraian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah dilakukan reviu SID selesai desain 1.776,78Ha dan kontrak konstruksi seluas 1.775,01 Ha, Kabupaten Luwu Utara sudah dilakukan reviu SID selesai desain 1.427,91Ha dan kontrak konstruksi seluas 1.427,91 Ha, Kabupaten Wajo sudah dilakukan reviu SID dan selesai desain 385,29 Ha dan kontrak konstruksi seluas 385,29 Ha, Kabupaten Bone sudah dilakukan reviu SID selesai desain 2.002,42Ha dan kontrak konstruksi seluas 2.000 Ha, Kabupaten sudah dilakukan reviu SID dan selesai desain 518,49 Ha dan kontrak konstruksi seluas 518,49 Ha, Kabupaten Gowa sudah dilakukan reviu SID dan selesai desain 238,61 Ha, dan berkontrak.

Realisasi yang dicapai hingga akhir Desember adalah 449,74 Ha atau 2,93%. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala terkait ketersediaan lahan yang benar-benar sesuai kriteria teknis, seperti topografi, sumber air, dan status legalitas lahan. Banyak calon lokasi yang bermasalah pada akses air irigasi, sehingga perlu biaya tinggi untuk pembangunan jaringan air, embung, atau pompanisasi. Faktor teknis lain adalah kondisi tanah yang masam, berbatu, atau rawan genangan sehingga memerlukan pekerjaan *land clearing* dan pengolahan berat. Keterbatasan alsintan, cuaca ekstrem, serta lambatnya proses administrasi mulai dari survei, perencanaan hingga verifikasi lokasi juga memperlambat realisasi cetak sawah. Realisasi cetak sawah rakyat dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 23. Progres Cetak Sawah Rakyat Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	KABUPATEN	ANGGARAN			FISIK		
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	TARGET (Ha)	REALISASI (Ha)	REALISASI (%)
1	Sidrapang Rappang	97,125,000,000	12,403,390,085	12.77%	2,775.00	82.47	2.97%
2	Luwu Utara	49,935,000,000	8,405,856,269	3.36%	7,141.00	7.04	0.10%
3	Wajo	14,000,000,000	2,292,078,418	16.37%	400.00	115.13	28.78%
4	Bone	70,000,000,000	12,211,555,031	17.45%	2,000.00	136.93	6.85%
5	Luwu Timur	70,000,000,000	3,163,817,518	4.52%	2,000.00	106.34	5.32%
6	Gowa	36,365,000,000	1,527,833,817	4.20%	1,039.00	1.83	0.18%
<b>Jumlah</b>		<b>537,425,000,000</b>	<b>40,004,531,138</b>	<b>7.44%</b>	<b>15,355.00</b>	<b>449.74</b>	<b>2.93%</b>

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, BRMP secara konsisten mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mutakhir, serta optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah diakses.

Pada tahun 2025, BPMP Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat **informatif** (Lampiran 9). Penghargaan ini juga menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan informasi, baik dalam aspek ketersediaan informasi berkala, serta merta, maupun informasi setiap saat, termasuk ketepatan waktu dan kualitas layanan atas permohonan informasi masyarakat. Capaian penghargaan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai kinerja organisasi dan mendukung pembangunan Zona Integritas, khususnya pada area penguatan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, BRMP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

### 3.4 Realisasi Anggaran

#### a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga mengatur mengenai analisis atas efisiensi sumber daya anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai IKPA merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA. Adapun indikator yang dimaksud yaitu :

- Revisi DIPA : 10 persen
- Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen
- Penyerapan Anggaran : 20 persen
- Belanja Kontraktual : 10 persen
- Penyelesaian Tagihan : 10 persen
- Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen
- Dispensasi SPM : 5 persen
- Capaian output : 25 persen.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPMP Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPMP Sulawesi Selatan

Gambar menunjukkan capai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk setiap indikator yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh oleh BPMP Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang telah sesuai untuk masing-masing

indikator. Adapun nilai IKPA secara keseluruhan yang diperoleh oleh BPMP Sulawesi Selatan adalah sebesar 94,89% yang berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 38 tergolong ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Analisis efisiensi anggaran berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu dapat dilihat pada Gambar 3.

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selish	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	054030 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	05 Program Dukungan Manajemen	0518.05A.006 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Seingkat	480.000.000	10.000.000	1,00	1,00	10.000.000	470.000.000	97,92	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	054030 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	05 Program Dukungan Manajemen	0518.05A.008 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	458.000.000	6.110.000	1,00	1,00	6.110.000	451.890.000	98,67	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
3	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	054030 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	05 Program Dukungan Manajemen	0518.05B.003 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	11.680.000	1,00	1,00	11.680.000	228.320.000	95,13	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Gambar 3. Data Efisiensi SBK BPMP Sulawesi Selatan

Tingkat efisiensi per RO untuk BPMP Sulawesi Selatan berdasarkan Gambar memperlihatkan nilai yang sangat tinggi, yaitu di atas 95%. Nilai efisiensi ini merupakan indikator evaluasi kinerja anggaran yang membandingkan antara realisasi belanja dengan target anggaran yang mendukung ketercapaian RO. Capaian nilai efisiensi di atas 95% menunjukkan pelaksanaan kegiatan berlangsung efisien dengan nilai efisiensi per RO sebesar 20%.

## b. Penyerapan Anggaran

Salah satu indikator capaian kinerja instansi pemerintah adalah realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA awal tahun 2025, pagu awal anggaran BPMP Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 20.919.663.000, lalu setelah mengalami revisi sebanyak 22 kali, pagu akhir BPMP Sulawesi Selatan menjadi sebesar Rp. 25.225.341.000. Revisi ini terjadi sebagai bentuk penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan pada organisasi. Perubahan mencakup beberapa komponen seperti adanya blokir anggaran, revisi penambahan pemeliharaan, penambahan gaji pegawai, dan beberapa perubahan lainnya yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 24. Detail Revisi Anggaran 2025 BPMP Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Justifikasi
1.	Pergeseran anggaran	0	Pergeseran pada DUKMAN dengan menambah sub-komponen blokir efisiensi (layanan BMN, layanan umum dan 002).
2.	Pergeseran anggaran	0	Revisi 002
3.	Penambahan anggaran DUKMAN	1.850.000.000	<p>Penambahan anggaran pada beberapa sub komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan BMN (521211, 521811, 524111)</li> <li>• penyusunan program dan anggaran (521211, 521811, 522151, 524111)</li> <li>• money &amp; pengendali gratifikasi (521211, 521811, 524111)</li> <li>• system pengendalian intern &amp; MRI (521211, 521811, 524111)</li> <li>• Pengelola informasi public (521211, 521811, 524111).</li> <li>• Layanan penerapan SIP &amp; pengelolaan public hasil pertanian (521211, 521811, 524111).</li> <li>• Layanan kepegawaian (521211, 521811, 524111).</li> <li>• Layanan manajemen keuangan dan layanan ketatausahaan (521211, 521811, 524111).</li> <li>• Sinkronisasi kegiatan (521211, 521811, 524111, 522151).</li> <li>• Kebutuhan sehari-hari perkantoran (penambahan : pakaian dinas, penambah daya tahan tubuh, keperluan sehari-hari perkantoran 40 pegawai).</li> <li>• Pemeliharaan kantor (penambahan: pemeliharaan AC split dan pemeliharaan server).</li> </ul>
4.	Pergeseran anggaran	0	Revisi 001
5.	Penambahan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.552.600.000	Bertambahnya Program KAK-PB
6.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: produksi benih pokok (SS) padi, pendampingan program strategis kementan, revisi 001, dan pemeliharaan kantor.
7.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: produksi benih pokok (ss) padi, pendampingan program strategis kementan
8.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: produksi benih pokok (ss) padi, pendampingan program strategis kementan

9.	Pengurangan anggaran pada Program NTDSI	1.611.100.000	Pengurangan beberapa item dari sub-komponen ICARE yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1.c (hilang dari POK)</li> <li>• A1.d</li> <li>• A2.c (bisnis plan)</li> <li>• A2.c (BP)</li> <li>• B1.c (kentang)</li> </ul>
10.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: produksi benih pokok (ss) padi, pendampingan program strategis kementan, penyusunan program dan anggaran, monev, system pengendalian intern & MRI, pengelola informasi public, 001, 002.
11.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: pendampingan program strategis kementan, layanan kerumahtanggaan dan umum, 001 dan 002.
12.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: produksi benih pokok (ss) padi dan 001.
13.	Pengurangan anggaran Program DUKMAN	773.518.000	Pengurangan beberapa item pada komponen yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendampingan program strategis,</li> <li>• monev &amp; unit pengenalai gratifikasi</li> <li>• system pengendalian intern dan MRI</li> <li>• pengelola informasi public</li> </ul>
14.	Penambahan anggaran pada Program NTDSI	89.983.000	Bertambahnya sub-komponen Pendampingan Lembaga Tanaman Pangan Komoditas Jagung. Terdapat penambahan anggaran di beberapa komponen ICARE.
15.	Penambahan anggaran pada Program DUKMAN	415.500.000	Penambahan beberapa item pada komponen yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendampingan program strategis (524111 – lumpsum, transport dan penginapan)</li> <li>• 002 pada akun 523111 (detil baru: pemeliharaan mess, pemeliharaan parkir kendaraan dinas, pemeliharaan rumah dinas) dan akun 523121 (detil baru: perawatan computer).</li> </ul>
16.	Pergeseran anggaran	0	Revisi ICARE, perbenihan dan 001.
17.	Penambahan anggaran pada Program NTDSI	2.733.713.000	Bertambahnya sub-komponen A2.d (Matching Grant)
18.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: Pendampingan penerpan modernisasi pertanian tanaman pangan, ICARE dan pendampingan program strategis.
19.	Penambahan anggaran pada Program DUKMAN (layanan perkantoran)	48.500.000	Penambahan anggaran belanja pegawai (001) (menutupi kekurangan)
20.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: Pendampingan penerpan modernisasi pertanian tanaman pangan, ICARE, pendampingan program strategis, layanan kerumahtanggaan, 001 dan 002.

21.	Pergeseran anggaran	0	Revisi: ICARE, perbenihan, pendampingan program strategis, layanan kepegawaian, 001 dan 002.
22.	Pergeseran anggaran	0	Revisi 001

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Berdasarkan NOMOR: SP DIPA-018.09.2.634036/2025 tanggal 02 Desember 2024. Anggaran BRMP Sulsel TA. 2025 sebesar Rp. 25.225.341.000. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional), belanja modal, dan belanja lain- lain. Realisasi anggaran hingga Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.988.763.884,- (99,06%). Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2025 di sajikan pada Tabel 24.

Tabel 25. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2025

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
<b>634036</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	25.225.341.000	24.988.763.884	236.577.116	99,06
<b>51</b>	BELANJA PEGAWAI	7.718.202.000	7.680.378.792	37.823.208	99,51
<b>52</b>	BELANJA BARANG	16.952.779.000	16.754.025.092	198.753.908	98,83
<b>53</b>	BELANJA MODAL	554.360.000	554.360.000	0	100,00

Penyerapan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja BRMP Sulawesi Selatan. Adapun Penyerapan belanja pegawai sebesar 99,51%, belanja barang sebesar 98,83%, dan belanja modal sebesar 100% sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2025 sebesar 99,06%. Anggaran di BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025 telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung output sasaran perjanjian kinerja. Adapun serapan berdasarkan capaian output di BPMP Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 26. Capaian Output Kegiatan BPMP Sulawesi Selatan Ta. 2025

No	Indikator Kinerja/ Kegiatan	Target	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Capaian Akhir	Capaian (%)
<b>Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani</b>							
<b>1.</b>	<b>Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>7.201.712.000</b>	<b>7.083.303.040</b>	<b>99,43</b>	<b>6 Lembaga</b>	<b>110</b>
a.	Pendampingan Penerapan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	1 lembaga	157.080.000	157.080.000	100	1. Penangkar Benih Balla Parang 2. Penangkar Benih Harapan Tani	100
b.	Pendampingan Lembaga Tanaman Pangan Komoditas Jagung	1 lembaga	122.019.000	122.019.000	100	1. Kelompok Tani Baji Ati	100
c.	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	1 lembaga	6.922.613.000	6.804.204.040	98,29	1. Koperasi Tonasa sukses bersama (Demplot penggemukan sapi), 2. Koperasi Bawakaraeng maju bersama (Demplot Perbenihan Kentang G2), 3. Koperasi Bolaromang sejahtera bersama (Pembuatan pakan alternatif)	100

<b>Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian Yang Adaptif</b>							
<b>1.</b>	<b>Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif</b>	<b>Teknologi</b>	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan</b>	<b>100 unit</b>	<b>1.543.800.000</b>	<b>1.542.961.053</b>	<b>99,95</b>	<b>62,5 unit</b>	<b>100</b>
a.	Produksi Benih Pokok (SS) Varietas Unggul Padi	100 ton	1.543.800.000	1.542.961.053	99,95	<b>62,5 ton</b> benih, selebihnya sementara dalam proses pengujian di laboratorium	100
<b>Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern Oleh Petani</b>							
<b>1.</b>	<b>Jumlah petani yang menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i>, dan <i>Modern</i></b>	<b>orang</b>	-	-	-	-	-
<b>Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>							
<b>1.</b>	<b>Nilai Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan</b>	<b>80,02 nilai</b>	<b>16.432.819.000</b>	<b>16.363.050.159</b>	<b>99,58</b>	<b>83,14</b>	<b>103,90</b>
a.	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 pendampingan	950.000.000	949.870,000	99,99	Pendampingan LTT reguler di Sulawesi Selatan	
b.	Layanan BMN	1 layanan	10.000.000	10.000.000	100	1 layanan	100
c.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 layanan	6.140.000	6.110.000	99,51	1 layanan	100

d.	Layanan Umum	1 layanan	145.170.000	145.163.570	100	1 layanan	100
e.	Layanan Perkantoran	1 layanan	15.309.829.000	15.240.226.589	99,55	1 layanan	100
f.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan	11.680.000	11.680.000	100	1 layanan	100
<b>Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</b>							
<b>1.</b>	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan</b>	<b>91 nilai</b>				<b>94,31</b>	<b>103,64</b>

### c. PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPMP Sulawesi Selatan berasal dari berbagai layanan yang secara rinci tertera pada Tabel 45. Total PNBP tahun 2025 berjumlah 960.773.015 tertinggi berasal dari layanan pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp. 780.960.782 dan terendah pada pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp. 29.738.550. Sumber layanan selain berasal dari Balai, PNBP BPMP Sulawesi Selatan didukung oleh keberadaan Instalasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2MP) yang berada di beberapa lokasi yaitu IP2MP Gowa, IP2MP Jeneponto, IP2MP Luwu, IP2MP Bone-Bone dan Laboratorium Pengujian BPMP Sulawesi Selatan.

Tabel 27. Penerimaan Negara Bukan Pajak BPMP Sulawesi Selatan TA. 2025

No.	Mak/Akun	Jenis Layanan PNBP	Realisasi (Rp)
1.	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	780,960,782
2.	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	71,790,000
3.	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	78,283,647
4.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	36
5.	425151	Pendapatan Penggunaan Saran dan Prasarana sesuai dengan Tusi	29,738,550
Total			960,773,015

## IV. PENUTUP

### 4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun pelaporan, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil. Secara umum, capaian kinerja BRMP Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari terpenuhinya sebagian besar indikator kinerja utama serta kontribusi nyata dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian, khususnya percepatan modernisasi pertanian dan pencapaian swasembada pangan.

Capaian sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu 1) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan target 1 lembaga dan capaian yang diperoleh 1 lembaga yang telah didampingi (100%), 2) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan dengan target 100 unit dan capaian 100 unit benih (100%), 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian Nilai 83,14 (103,89%), dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian nilai 94,89 (104,27%).

Untuk memenuhi target yang ditetapkan bagi tiap-tiap indikator, BPMP Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan beberapa kegiatan teknis. Kegiatan-kegiatan ini anggarannya diatur dalam DIPA BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Berdasarkan SPAN, realisasi anggaran di BPMP Sulawesi Selatan adalah sebesar 99,06% dari pagu. Adapun pagu BPMP Sulawesi Selatan adalah Rp. 24.988.763.884 dan realisasi yang dicapai adalah Rp. 24.988.763.884. Dengan begitu, sisa anggaran yang tidak terserap pada DIPA tahun 2025 adalah sebesar Rp. 236.577.116 (0,94%). Selain realisasi anggaran, BPMP Sulawesi Selatan juga menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 960.773.015.

## **4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh untuk peningkatan kinerja BPMP Sulawesi Selatan ke depannya :

### **1) Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja**

Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja melalui penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan program kegiatan dengan dokumen perencanaan Kementerian Pertanian. Penguatan dilakukan dengan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

### **2) Optimalisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis**

Memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada program prioritas nasional dan strategis Kementerian Pertanian, khususnya modernisasi pertanian dan swasembada pangan. Kegiatan diarahkan agar lebih berdampak, adaptif terhadap kebutuhan wilayah, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi pemangku kepentingan.

### **3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran**

Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara tepat waktu, efisien, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, pengendalian internal yang efektif, serta pemantauan indikator kinerja anggaran agar capaian nilai kinerja anggaran berada di atas target yang ditetapkan.

### **4) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta pengembangan budaya kerja profesional dan berintegritas. Penguatan peran dan tanggung jawab pegawai dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas.

### **5) Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**

Mendorong penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembangunan Zona Integritas, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.

6) **Peningkatan Kualitas Data, Informasi, dan Pelaporan**

Memperkuat sistem pengelolaan data dan informasi kinerja yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kualitas pelaporan dilakukan agar mampu menggambarkan capaian kinerja secara komprehensif serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

7) **Penguatan Koordinasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan**

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat implementasi program dan memperluas dampak kegiatan BRMP Sulawesi Selatan.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Selatan



## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025

### 1. Perjanjian Kinerja Awal



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522  
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusuf  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Yusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	3. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		4. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	3
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	85

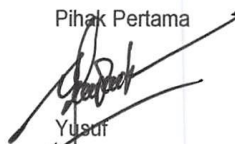
No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>5.990.316.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	5.990.316.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>		-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar		-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>14.929.347.000</b>
3	Dukungan Manajemen, Fasilitas Instrumen Pertanian	Rp	14.929.347.000

Makassar, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

  
Fadjry Djufry

Pihak Pertama

  
Yusuf

## 2. Perjanjian Kinerja Revisi Pertama



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 17,5 MAKASSAR 90243  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194  
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusuf

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Yusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK. WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	Rp	<b>5,990,316,000</b>
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	5,990,316,000
2	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	Rp	<b>1,552,600,000</b>
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	1,552,600,000
3	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp	<b>16,779,347,000</b>
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	16,779,347,000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 6,983,946,000 terdiri dari :

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 5,990,316,000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 8,800,000
- Program Dukungan Manajemen Rp. 984,830,000

Pihak Kedua

  
 Fadry Djufry†

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Pertama

  
 Yusuf

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	100	Ton
<b>TOTAL</b>				Ton

### 3. Perjanjian Kinerja Revisi Kedua (Akhir)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 17,5 MAKASSAR 90243  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194  
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusuf

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Fadry Djufry

  
Yusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
		UTAMA			
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1.	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2.	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	100	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1.	Jumlah petani yang menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	Orang
<b>LAINNYA</b>					
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1.	Nilai Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	80,02	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	91	Nilai (0-100)

<b>Kode</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 7,202,912,000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 7,202,912,000
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1,552,600,000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 1,552,600,000
WA	Dukungan Manajemen	Rp 16,469,829,000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 16,469,829,000
		<b>Rp 25.225.341.000</b>

Total anggaran terblokir senilai Rp. 47,010,000,- terdiri dari:  
 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 1.200.000,-  
 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 8.800.000,-  
 Program Dukungan Manajemen Rp. 37.010.000,-

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama,

  
Yusei

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025**

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi modemisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	62,5	Ton
		Produksi Calon Benih FS		Ton
		Produksi Calon Benih SS	37,5	Ton
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>Ton</b>

### Lampiran 3. Manual IKU BPMP Sulawesi Selatan

#### MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

##### Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)

<b>Program</b>	<b>Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	<b>Formula</b> Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	<b>Tujuan</b> mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
<b>Satuan</b>	Lembaga
<b>Target</b>	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact

<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading	
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	BRMP Penerapan	
<b>Sumber Data</b>	BRMP Penerapan	
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
<b>Mitigasi Risiko</b>	<b>Potensi Risiko</b>	
	<b>Mitigasi</b>	
	Rendahnya pemahaman lembaga penerap terkait standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.
	Komitmen Lembaga Penerap untuk menerapkan standar secara konsisten masih rendah	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang
<b>Catatan</b>		

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

<b>Program</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan. <b>Formula</b> Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan <b>Tujuan</b> Mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
<b>Satuan</b>	Teknologi
<b>Target</b>	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung

	<input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize										
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	BRMP Penerapan										
<b>Sumber Data</b>	BRMP Penerapan										
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir										
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan										
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td> <td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td> </tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td> <td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td> </tr> <tr> <td>Minimnya dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan dan pendampingan</td> <td>Optimalisasi peran penyuluh, kolaborasi dengan CSR, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, kolaborasi dengan CSR, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.		
Potensi Risiko	Mitigasi										
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.										
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.										
Minimnya dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, kolaborasi dengan CSR, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.										
<b>Catatan</b>											

3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan

<b>Program</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	<b>Formula</b> Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan pada tahun berjalan
	<b>Tujuan</b> untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya, sehingga mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta keberlanjutan.
	<b>Satuan</b> Unit
<b>Target</b>	2025: 100 2026: 4.225 2027: 100 2028: 100 2029: 100
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High

<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact												
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading												
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)												
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize												
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	BRMP Penerapan												
<b>Sumber Data</b>	BRMP Penerapan												
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir												
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan												
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td> <td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td> </tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td> <td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>Kerusakan benih saat proses pascapanen (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)</td> <td>Pengaturan musim tanam, Optimisasi rak pengeringan</td> </tr> <tr> <td>Kerusakan benih saat penyimpanan</td> <td>Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang</td> </tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	Kerusakan benih saat proses pascapanen (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)	Pengaturan musim tanam, Optimisasi rak pengeringan	Kerusakan benih saat penyimpanan	Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang
Potensi Risiko	Mitigasi												
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya												
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.												
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.												
Kerusakan benih saat proses pascapanen (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)	Pengaturan musim tanam, Optimisasi rak pengeringan												
Kerusakan benih saat penyimpanan	Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang												
<b>Catatan</b>													

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)

<b>Program</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	<b>Formula</b> Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	<b>Tujuan</b> Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
<b>Satuan</b>	Jumlah
<b>Target</b>	2025: 0 2026: 600 2027: 1.200 2028: 1.800 2029: 2.400
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung

<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact												
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading												
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)												
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize												
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	BRMP Penerapan												
<b>Sumber Data</b>	BRMP Penerapan												
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir												
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan												
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td> <td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td> </tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td> <td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>Kerusakan benih saat proses pascapanenan (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)</td> <td>Pengaturan musim tanam, Optimisasi rak pengeringan</td> </tr> <tr> <td>Kerusakan benih saat penyimpanan</td> <td>Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang</td> </tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	Kerusakan benih saat proses pascapanenan (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)	Pengaturan musim tanam, Optimisasi rak pengeringan	Kerusakan benih saat penyimpanan	Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang
	Potensi Risiko	Mitigasi											
	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya											
	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.											
	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.											
	Kerusakan benih saat proses pascapanenan (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)	Pengaturan musim tanam, Optimisasi rak pengeringan											
Kerusakan benih saat penyimpanan	Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang												
<b>Catatan</b>													

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

<b>Program</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<p><b>Definisi</b>            Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.</p> <p><b>Formula</b>            1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal            2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP</p> <p><b>Tujuan</b>            Mewujudkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.</p>
<b>Satuan</b>	Nilai
<b>Target</b>	2025: 80,02 2026: 83,14 2027: 83,15 2028: 83,16 2029: 83,17
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada								
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)								
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya								
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High								
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact								
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading								
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize								
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	BRMP Penerapan								
<b>Sumber Data</b>	BRMP Penerapan								
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir								
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan								
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td> <td>Komitmen Pimpinan dalam internalisasi nilai-nilai pembangunan ZI sehingga menjadi budaya kerja, Sosialisasi 6 nilai pembangunan ZI secara berkala</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td> <td>updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk pengumpulan eviden.</td> </tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td> <td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td> </tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Komitmen Pimpinan dalam internalisasi nilai-nilai pembangunan ZI sehingga menjadi budaya kerja, Sosialisasi 6 nilai pembangunan ZI secara berkala	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk pengumpulan eviden.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
Potensi Risiko	Mitigasi								
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Komitmen Pimpinan dalam internalisasi nilai-nilai pembangunan ZI sehingga menjadi budaya kerja, Sosialisasi 6 nilai pembangunan ZI secara berkala								
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk pengumpulan eviden.								
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata								
<b>Catatan</b>									

6. Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)

<b>Program</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<p><b>Definisi</b> Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA..</p> <p><b>Formula</b> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu</p> <p><b>Tujuan</b> Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..</p>
<b>Satuan</b>	Nilai
<b>Target</b>	2025: 91 2026: 91 2027: 91 2028: 91 2029: 91
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya											
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High											
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact											
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading											
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize											
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	BRMP Penerapan											
<b>Sumber Data</b>	BRMP Penerapan											
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir											
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan											
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td> <td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.</td> </tr> <tr> <td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td> <td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td> </tr> <tr> <td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td> <td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td> </tr> <tr> <td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td> <td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Potensi Risiko	Mitigasi											
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.											
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.											
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan											
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan											
<b>Catatan</b>												

Lampiran 4. Rencana Aksi BPMP Sulawesi Selatan Tahun 2025

**RENCANA AKSI  
TAHUN ANGGARAN 2025  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

							TW1	TW2	TW3	TW4
SS02	Komoditas Pertanian Yang Bernilai	IKSS0202	02 - Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional		35.00	%				
SP01	Meningkatnya sertifikasi Usahatani	IKSP0101	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi		20.92	%	0	0	50	100
<b>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan</b>										
SK01	Meningkatnya pelaku usaha tani	IKK1	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar		1	Uasahatani				
		7911.BDB.101.051.A	Pendampingan Penerapan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	190,316,000	2	Lembaga	0	0	50	100
		7911.QDB.101.051.A	Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta (A.1.d)	125,000,000	1	kerjasama	0	10	50	100
		7911.QDB.101.051.B	Meningkatnya layanan publik untuk dukungan rantai nilai (A.1.e)	554,360,000	1	unit	0	10	50	100
		7911.QDB.101.051.C	Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan	647,040,000	1	kegiatan	0	10	60	100
		7911.QDB.101.051.D	Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani	300,000,000	300	orang	0	10	70	100
		7911.QDB.101.051.E	Pengembangan rencana bisnis yang layak untuk mendefinisikan pertanian	400,000,000	3	koperasi	0	10	60	100
		7911.QDB.101.051.F	Penguatan rencana usaha/bisnis brigade pangan dalam rangka percepatan	300,000,000	4	kabupaten	0	10	60	100
		7911.QDB.101.051.G	Mendukung transfer dan adopsi teknologi yang sudah ada dan relevan dengan	712,500,000	1	demfam	0	10	70	100
		7911.QDB.101.051.H	Mendukung transfer dan adopsi teknologi yang sudah ada dan relevan dengan	250,000,000	1	demplot	0	10	60	100
		7911.QDB.101.051.I	Pelatihan untuk personel sector public (B.2.b)	200,000,000	30	orang	0	10	60	100
		7911.QDB.101.051.J	Manajemen Program (C.1)	350,000,000	1	kegiatan	0	0	50	100
		7911.QDB.101.051.K	Monitoring dan Evaluasi (C.2)	200,000,000	1	kegiatan	0	0	50	100
		7911.QDB.101.051.L	Manajemen Pengetahuan untuk Peningkatan Penqarusutamaan (C.3)	150,000,000	3	produk	0	0	50	100

Lampiran 5. SOP Penyusunan LAKIN BPMP Sulawesi Selatan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</b> <b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</b> <b>BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN</b> <b>SULAWESI SELATAN</b></p>	Nomor SOP	B-020/OT.210/H.12.22/04/2025
	Tanggal Pembuatan	April 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	April 2025
	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Ir. Yusuf, M.Si NIP. 196710272003121001
	Nama SOP	<b>LAPORAN BULANAN FISIK DAN KEUANGAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Permenpan RB No. 53 tahun 2014</li> <li>Perpres No. 29 tahun 2014</li> <li>PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan</li> <li>Peraaturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggungjawab Kegiatan</li> <li>Minimal Berpendidikan S1</li> <li>Memahami SAKIP</li> <li>Memahami prinsip-prinsip penyusunan LAKIN</li> <li>Memahami renstra Perakitan dan Modernisasi Pertanian</li> <li>Memahami tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</li> </ul>

<p><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP LAKIN</li> <li>• SOP penyusunan laporan akhir</li> <li>• SOP penyusunan perjanjian kinerja</li> <li>• SOP Laporan bulanan</li> <li>• SOP Laporan Tahunan</li> </ul>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Seperangkat Komputer dan ATK</u></li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terinformasikannya kinerja BRMP Sulawesi Selatan</li> <li>- Tidak tersedianya bahan evaluasi AKIP</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAKIN</li> </ul>



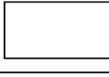





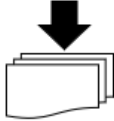
	Nomor SOP	B-020/OT.210/H.12.22/04/2025
	Tanggal Pembuatan	April 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	April 2025
<b>SOP LAPORAN KINERJA</b> SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN (BRMP SULSEL)		
Pengertian	:	Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Tujuan	:	Terselesaikan Laporan Kinerja
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li><li>• Permenpan RB No. 53 tahun 2014</li><li>• Perpres No. 29 tahun 2014</li><li>• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</li></ul>
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Sulawesi Selatan</li><li>• Mengumpulkan data bahan laporan kinerja</li><li>• Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan</li> <li>• Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui untuk pencetakan laporan kinerja</li> <li>• Mendokumentasikan laporan</li> </ul>
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Laporan bulanan</li> <li>• SOP laporan Tahunan</li> </ul>

NO : B-020/OT.210/H.12.22/04/2025

**SOP LAPORAN BULANAN FISIK DAN KEUANGAN**  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Tim Penyusun Laporan	Katimker Evaluasi	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Ka. BRMP Sulsel	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi dan menyampaikan ke seksi evaluasi								
2	Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi					Data dan Informasi	1 Bulan	Berkas	
3	Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja					Data dan Informasi	7 hari	Draf Laporan	
4	Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan					Draf Laporan	2 Bulan	Draf Laporan	
5	Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui pencetakan laporan kinerja					Draf	15 hari	Buku Laporan Kinerja	
6	Pencetakan Laporan					Buku Laporan Kinerja	3 hari	Buku Laporan Kinerja	

7	Mendokumentasikan laporan					Buku Laporan Kinerja	1 hari	Buku Lakin	
---	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------	------------	--

## Lampiran 6. SK Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 17,5 MAKASSAR 90243  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194  
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
Nomor : B-626/Kpts/OT.050/H.12.22/05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 127/ PMK.02/ 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut "TPKO BPMP Sulsel" dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : TPKO BPMP Sulsel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengarah
    - Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
  2. Penanggung Jawab
    - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
  3. Pelaksana
    - I. Ketua
      - memimpin TPKO BPMP Sulsel dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di level Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
      - memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan sesuai ketentuan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian  
Sulawesi Selatan  
Nomor : B-626/Kpts/OT.050/H.12.22/05/2025  
Tanggal : 22 Mei 2025

TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2025

A. Pengarah

Ketua : Kepala BPMP Sulawesi Selatan  
Anggota : Kepala Sub. Tata Usaha BPMP Sulawesi Selatan  
Kepala Laboratorium Maros  
Kepala IP2MP Gowa  
Kepala IP2MP Jeneponto  
Kepala IP2MP Mariri  
Kepala IP2MP Bone Bone

B. Penanggung Jawab : Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi BPMP Sulsel

C. Pelaksana

Ketua : Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi BPMP Sulsel  
Anggota : Faisal, SP  
Erina Septianti, STP, M.Si  
Rifah Hestiany Arum, STP, M.Si  
Muhammad Iqbal Ardah, SP, M.Si  
Aznurandi Krisnandi Azis, S. Akun



Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Yusuf, M.Si.

NIP. 19671027 200312 1 001

## II. Anggota

melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di level Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TPKO BPMP Sulsel bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan selaku ketua pengarah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO BPMP Sulsel dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Masa kerja TPKO BPMP Sulsel sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana TPKO BPMP Sulsel dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 22 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



I. Yusuf, M.Si  
NIP. 19671027 200312 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan

## Lampiran 7. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Selatan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 17,5 MAKASSAR 90243  
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194  
WEBSITE : [sulsel.brmp.pertanian.go.id](http://sulsel.brmp.pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
Nomor : B-616/Kpts/OT.050/H.12.22/05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
  - bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
  - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - Peraturan Presiden No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris dan Anggota Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengarah
    - Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
    - Melakukan pengesahan terhadap laporan kinerja yang telah disusun;
  2. Penanggung Jawab
    - Mengawasi keseluruhan proses penyusunan laporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - Bertanggung jawab atas kualitas dan akuntabilitas laporan kinerja balai.
  3. Ketua Tim
    - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan laporan kinerja.
    - Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan laporan.
    - Mengkoordinasikan pengumpulan data dari setiap unit kerja.
    - Melakukan pengendalian dan memastikan laporan tersusun tepat waktu.
    - Melaporkan perkembangan penyusunan laporan kepada penanggung jawab.

4. Sekretaris

- Membantu ketua tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan.
- Menyiapkan administrasi kegiatan tim penyusun laporan.
- Menghimpun dan mengkompilasi data dari anggota tim.
- Menyusun draft awal laporan kinerja berdasarkan data yang telah dihimpun.
- Mengarsipkan dokumen dan data pendukung laporan kinerja.

5. Anggota Tim

- Mengumpulkan data kegiatan, capaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran dari unit kerja masing-masing.
- Menyusun bahan analisis capaian kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menyampaikan data dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
- Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim dalam rangka penyusunan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 22 Mei 2025



Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Yusuf, M.Si  
NIP. 19671027 200312 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan  
Nomor : B-616/Kpts/OT.050/H.12.22/05/2025  
Tanggal : 22 Mei 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2025

- A. Pengarah : 1. Ir. Yusuf, M.Si  
2. Andi Wahyudi, S.Kom
- B. Penanggung Jawab : Sarintang, SP, M.Si
- C. Ketua Tim : Rifah Hestyani Arum, STP, M.Si
- D. Sekretaris : Erina Septianti, STP, M.Si
- E. Anggota : 1. Andi Faisal Suddin, SP, M.Si  
2. Faisal, SP  
3. Aznurandi Krisnandi Asiz, S.Akun  
4. Ulfah, SM  
5. Jamaya Halifah, S.Pi, M.I.Kom  
6. Muhammad Iqbal Ardah, SP, M.Si  
7. Qayyimatus Nasriyah, SP  
8. Wahyuddin



Kuasa Pengguna Anggaran,

*[Handwritten Signature]*  
Ir. Yusuf, M.Si  
NIP. 19671027 200312 1 001

Lampiran 8. Sertifikat SNI Lembaga Penerap

SUSTAINABLE  
EXCELLENCE

## CERTIFICATE

<b>Standar</b>	: SNI 6233:2015
<i>Standard</i>	
<b>Nomor Sertifikat</b>	: UDHT/001-MGI-135/XIV/25
<i>Certificate Number</i>	
<b>Nomor Referensi</b>	: UDHT/001/STF/XI/25
<i>Reference Number</i>	

PT Multicert Global Indonesia memberikan sertifikat sesuai informasi di bawah ini berdasarkan skema sertifikasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 4 Tahun 2023 (tipe 5)  
 PT Multicert Global Indonesia certifies the following(s) in accordance with the product certification scheme of the National Standardization Agency Regulation No. 4 Year 2023 (type 5)

<b>Pemegang Sertifikat</b>	: UD. HARAPAN TANI
<i>Certificate Holder</i>	Pekang Labbu, Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
<b>Unit Pengolahan</b>	: UD. HARAPAN TANI
<i>Processing Unit</i>	Jl. Poros Pallangga, Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, 92161, Indonesia
<b>Perwakilan</b>	: UD. HARAPAN TANI
<i>Representative</i>	Pekang Labbu, Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
<b>Perwakilan Perusahaan</b>	: H. SAMPARA DG LALANG
<i>Company Representative</i>	
<b>Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	: 1401230007046
<i>Business Identification Number</i>	
<b>Nama Produk</b>	: Benih Padi Inbrida
<i>Name of Product</i>	Inbred Rice Seeds
<b>Tipe</b>	: Untuk lebih lengkap, lihat pada Lampiran Sertifikat.
<i>Type</i>	For more detail, see Annex to Certificate.
<b>Merek</b>	: HTGW-88
<i>Brand</i>	
<b>Masa Berlaku</b>	: Sertifikat Berlaku dari:
<i>Validity</i>	31 Desember 2025 sampai dengan 30 Desember 2029.
	The certificate is valid from:
	31 December 2025 until 30 December 2029.
	Lokasi pabrik wajib dilakukan audit surveilen tahunan dengan batas waktu seluruh audit berikutnya adalah pada 31 Desember.
	The factory site is subject to annual surveillance audit with the due date for all future audits is on 31 December.



Jakarta, 31 Desember 2025





LBP-072-ICN



Hapsari Sulistyoni, SH, LLM  
President Director

PT MULTICERT GLOBAL INDONESIA  
Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98 Kebon Metali, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10230 - INDONESIA - Tel. +62 21 3907774

www.mgi-cert.com

F/MGI-STF/01/02

Page 1 of 2

\*MGI is a registered trademark. Utilization and application requires prior approval

## ANNEX to CERTIFICATE

**Judul Standar** : SNI 6233:2015  
*Standard Title* : Benih Padi Inbrida

**Nomor Sertifikat** : UDHT/001-MGI-135/XII/25  
*Certificate Number*

**Nomor Referensi** : UDHT/001/STF/XI/25  
*Reference Number*

**Nomor Laporan Audit** : UDHT/002/AR/XII/25  
*Audit Report Number*



<b>Nomor Laporan Pengujian:</b> <i>Test Report No</i>	<b>Daftar tipe atau ukuran dalam cakupan:</b> <i>List of type or size in scope</i>
<p>(1) S.362/11/2025</p> <p>(2) S.413/12/2025</p>	<p>Benih Padi Inbrida</p> <p>Benih Sebar : Inpari 42 - Agritan GSR</p>

\* MGI is a registered trademark. Utilization and application requires prior approval.



Jakarta, 31 Desember 2025



PT MULTICERT GLOBAL INDONESIA  
Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98 Kebon Melati, Tanah Abang

Lampiran 9. Sertifikat Penghargaan Kategori Informatif

